

MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA

Laporan Pencapaian 2023 Otorita Ibu Kota Nusantara



NUSANTARA

Kantor Nusantara
Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)
Tower Heliconia, Lantai 2
Nusantara, Kalimantan Timur

Kantor Jakarta
Menara Mandiri Tower 2, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Kantor Balikpapan
Jl. Mulawarman No. 99
Balikpapan, Kalimantan Timur - 76116

E-mail IKN:
halo@ikn.go.id





MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA

Laporan Pencapaian 2023 Otorita Ibu Kota Nusantara



NUSANTARA

Kantor Nusantara
Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)
Tower Heliconia, Lantai 2
Nusantara, Kalimantan Timur

Kantor Jakarta
Menara Mandiri Tower 2, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Kantor Balikpapan
Jl. Mulawarman No. 99
Balikpapan, Kalimantan Timur - 76116

E-mail IKN:
halo@ikn.go.id







NUSANTARA

KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang untuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia di masa depan.

Sesuai tujuan Indonesia Emas 2045, IKN mengusung visi “Kota Dunia untuk Semua”.

Kota ini akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang didesain sebagai kota modern berstandar internasional berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. IKN dibangun sebagai kota inklusif, cerdas (*smart city*), hijau (*green city*), dan nyaman dihuni bagi semua orang (*liveable city*).

Keberadaan IKN sekaligus menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia.

IKN merupakan transformasi pembangunan Indonesia berdimensi jangka panjang. Untuk itu, pengembangan IKN telah disusun rinci hingga tahun 2045.

Lokasi : Plasa Seremoni
Foto : Humas OIKN

DAFTAR ISI



Sambutan
Presiden RI

4

Pengantar
Kepala Otorita
Ibu Kota
Nusantara

8

Ikhtisar
Pencapaian
2023

10

Lima Tahap
Pembangunan
IKN 2022-2045

20

Profil Otorita
IKN

22

Sekilas IKN 24
Capaian Kinerja Tim
Transisi Pendukung
Persiapan,
Pembangunan, dan
Pemindahan Ibu Kota
Negara (2022) 28

Mengenal Otorita
IKN 32
Fondasi Awal Menuju
Kota Layak Huni dan
Dicintai 34

IKN Memacu
Pertumbuhan

40

Dampak Ekonomi 44
Kelompok Hidroponik
Nusantara 44
Batik Tulis Nusantara 46
Partini, Penjual Suvenir
IKN Pasar Rebo 48
Berharap Kerupuk
Amplang Jadi
Oleh-Oleh Resmi IKN 50
Menuai Hasil dari
Pelatihan UMKM 52
Meraup Rezeki dari
Frozen Food 53

Bisnis Penunjang
Pembangunan IKN jadi
Primadona 54
Gurahnya Bakso Sepaku 56
UKM dan Transaksi
Nontunai Tumbuh
Pesat 57
Jeli Membaca
Peluang dari Pesatnya
Pembangunan
Nusantara 59
Hibah Lahan untuk
Jalan Akses 61

Teknologi dan
Pendidikan 62
Transformasi SDN 020
Sepaku:
Lengkap dan Modern 62
Membangun SDM Siap
Pakai 65
Desa Pintar Bukit Raya 67
Rumah Teknologi
Nusantara 69
Energi Hijau dan
Masyarakat Lokal 72
Komitmen
Menyediakan Energi
Bersih di IKN 72
Agar Tidak Menjadi
Penonton Kemajuan
IKN 74

Investasi untuk
Masa Depan

76

Kemitraan
Global Menuju
Kota Dunia

84

Informasi
Pendukung

90

Cakupan Wilayah IKN 92
Pembagian
Wilayah Perencanaan
(WP) 93
Delapan
Prinsip Utama
Pembangunan IKN 95
Kepala, Wakil Kepala,
dan Pejabat
Pimpinan Tinggi
Madya
Otorita IKN 95
Tentang Logo IKN 96
Produk Digital &
Struktur Organisasi
Otorita IKN 98

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Saya mengapresiasi terbitnya laporan perdana dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Publikasi ini dapat memberi gambaran yang lengkap mengenai lembaga yang menjadi motor utama dalam pembangunan ibu kota negara kita, Nusantara.

Telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan IKN menjadi prioritas nasional. Membangun ibu kota baru bukanlah sekadar menggeser pusat pemerintahan atau mendirikan infrastruktur. Pembangunan IKN adalah bagian dari strategi besar Indonesia sebagaimana termaktub dalam Visi Indonesia Emas 2045, yang merupakan peta jalan bagi perwujudan Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Visi Indonesia Emas 2045, kita ingin Indonesia menjadi negara maju saat 100 tahun kemerdekaannya di 2045. Dengan visi ini, kita bertekad untuk mewujudkan kualitas manusia yang unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Dalam kerangka tersebut, IKN berperan penting untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia. Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembangunan ibu kota baru ini, terus mengambil upaya untuk mengakselerasi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

Untuk itu, saya mengapresiasi Otorita IKN yang telah melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi untuk pembangunan IKN. Saat meninjau pembangunan IKN secara langsung, saya melihat kemajuannya pesat sekali. Selain pembangunan infrastruktur fisik oleh pemerintah, telah berjalan pula konstruksi oleh investor swasta, proses penghijauan hutan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dan pemberdayaan warga setempat. Saya yakin kawasan inti pusat pemerintahan IKN sudah akan dapat berfungsi di tahun 2024 ini.

Semoga publikasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IKN, serta menggugah kita semua untuk gotong royong bersama Otorita IKN membangun ibu kota baru ini. Karena IKN adalah kota dunia bagi semua.



Presiden Joko Widodo memimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air Nusantara (14/03/2022).



Presiden Joko Widodo meresmikan *groundbreaking* SDN 020 Sepaku (1/11/2023).



Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus penanaman pohon di lokasi Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara, Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) (20/12/2023).



Presiden Joko Widodo memulai *groundbreaking* Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) sebagai RS pertama pemerintah di IKN (20/12/2023).



Presiden Joko Widodo meluncurkan transportasi ramah lingkungan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) (21/12/2023).



Presiden Joko Widodo melakukan *groundbreaking* pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kawasan IKN (17/01/2024).

PENGANTAR KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



Sejarah baru ditorehkan. Kita akhirnya memiliki ibu kota negara yang dibangun oleh bangsa sendiri. Sebelumnya, gagasan membangun ibu kota negara baru pernah dicetuskan Presiden pertama RI Soekarno pada 1957. Sempat dibahas pada periode Presiden RI selanjutnya, namun baru di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) rencana pemindahan ibu kota negara terwujud. Presiden Jokowi menyampaikan secara resmi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2019.

Seperti disampaikan Presiden pada Sidang Tahunan MPR 2019, ibu kota negara bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. IKN dibangun demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi Indonesia. Sebuah lompatan untuk transformasi bangsa sesuai visi Indonesia Emas 2045. Sekaligus menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar membangun sarana fisik pusat pemerintahan dan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Kalimantan. IKN menjadi contoh peradaban baru perkotaan di Indonesia yang memiliki lima karakter, yakni *Green, Smart, Inclusive, Resilient* dan *Sustainable*. *Green* berarti memanfaatkan kawasan hijau dan rendah karbon; *Smart* berarti memanfaatkan teknologi pintar; *Inclusive* artinya lingkungan kerja dan masyarakat yang inklusif; *Resilient* menunjukkan masyarakat yang tangguh dan ingin terus maju; dan *Sustainable* berarti ekosistem kota yang berkelanjutan.

Tahap pertama pembangunan IKN di periode 2022-2024 merupakan langkah awal dari lima tahap pengembangan IKN sampai tahun 2045. Pembangunan dimulai dengan konsolidasi tanah dan pemadatan tanah (*land clearing*) sejak Agustus 2022 untuk areal bangunan inti dan infrastruktur dasar.

Mulai tahun 2023, dilakukan akselerasi pembangunan Tahap I IKN khususnya pembangunan Istana Kepresidenan, Kantor Presiden, Kantor Kementerian, Sumbu Kebangsaan, Plaza Seremoni, Kantor Lembaga Pemerintah, Kawasan Komersial, infrastruktur dasar, dan akses jalan ke IKN. Perkembangan pembangunan Tahap I IKN per Januari 2024 mencapai 71,47 persen.

Di samping itu, minat investor dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN cukup tinggi. Otorita IKN (OIKN) menerima sedikitnya 350 *Letter of Intent* (LoI) dari para investor dalam dan luar negeri. Adapun 23 investor pelopor dalam negeri sudah menunjukkan komitmennya dengan menjadi bagian dari peletakan batu pertama (*groundbreaking*) 1 sampai 4 pembangunan IKN yang dilakukan pada September 2023, November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024.

Bagi OIKN pembangunan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari IKN. Selama tahun 2022 dan 2023, kami bersama-sama dengan instansi pemerintah, BUMN, kampus, dan lembaga kemasyarakatan turut menyiapkan pemberdayaan masyarakat setempat. Berbagai inisiasi, pendampingan, dan peningkatan *skill* dilakukan OIKN untuk masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip IKN sebagai kota inklusif yang membuka ruang buat semua pihak. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal (*no one left behind*), mengutip tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tentunya, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semua pihak yang mendukung fondasi awal pembangunan IKN sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Bambang Susantono
Kepala Otorita IKN

IKHTISAR PENCAPAIAN

2023

Capaian Pembangunan Batch 1

71,57 %



Istana Presiden dan Lapangan Upacara

53,88 %



sumber: Kementerian PUPR



Sumbu Kebangsaan Batch I

97,61 %



sumber: Kementerian PUPR



Bendungan Sepaku Semoi

100 %



sumber: Kementerian PUPR

Batch 1 adalah: Paket pekerjaan fisik yang dimulai pada 2020 - 2023

Capaian Investasi

Total investasi

Rp47,5 triliun

Total investasi swasta

Rp35,9 triliun

Jenis Investasi



Hotel
6 investor swasta



Pendidikan
2 investor swasta



Hunian
5 investor swasta



Kesehatan
3 investor swasta



Ritel dan Logistik
8 investor swasta dan BUMN



Energi dan Transportasi
2 investor swasta dan BUMN



Perkantoran
7 investor swasta dan BUMN



Area Hijau
2 investor swasta

Kunjungan ke IKN oleh Calon Investor dari 10 Negara



Amerika Serikat



Finlandia



India



Jepang



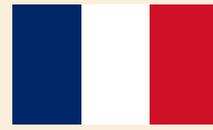
Kazakhstan



Korea Selatan



Persatuan Emirat Arab



Prancis



Singapura



Tiongkok

350 Letter of Intent (LoI) dari calon investor yang telah diterima Otorita IKN. Beberapa calon investor terbanyak antara lain berasal dari 8 negara berikut ini



Amerika Serikat



Finlandia



Jepang



Korea Selatan



Malaysia



Singapura



Spanyol



Tiongkok

Kesepakatan Kerja Sama dan Kemitraan



28

Lembaga Internasional yang Mendukung IKN



ADB - Asian Development Bank



ADB Institute - Asian Development Bank Institute



ESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific



ERIA - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia



FAO - Food and Agriculture Organization



ILO - International Labour Organization



IsDB - Islamic Development Bank



JBIC - Japan Bank for International Cooperation



JIBH - Japan International Association for the Industry of Building and Housing



JICA - Japan International Cooperation Agency



KIND - Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation



Tony Blair Institute for Global Change



UCLG - United Cities and Local Governments



UNDP - United Nations Development Programme



UNEP - United Nations Environment Programme



UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization



UNFPA - United Nations Population Fund



UN Habitat - United Nations Human Settlements Programme



UNICEF - United Nations Children's Fund



UNIDO - United Nations Industrial Development Organization



UNOPS - United Nations Office for Project Services



UNRCO - United Nations Resident Coordinator's Office in Indonesia



UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women



IOM - International Organization for Migration



UPDIS - Urban Planning and Design Institute of Shenzhen



USAID - U.S. Agency for International Development



WRI - World Resources Institute



WWF - World Wildlife Fund

Kesepakatan Kerja Sama dan Kemitraan



11 Kerja Sama Universitas Dalam dan Luar Negeri di IKN



Institut Pertanian Bogor



Universitas Mulawarman



Institut Teknologi Bandung



Delft University of Technology, Belanda



Universitas Brawijaya



Erasmus University Rotterdam, Belanda



Universitas Gadjah Mada



Leiden University, Belanda



Universitas Indonesia



Stanford-Doerr School of Sustainability, Amerika Serikat



University of Turku, Finlandia



10 Kerja Sama Perusahaan Teknologi untuk Proof of Concept (POC) di IKN



Advanced Air Mobility – Hyundai Motor Company, Korea Selatan



Smart Home Appliances Demonstrations – Telkom Indonesia, Indonesia



Smart Living and Robotics Demonstrations – LG CNS, Korea Selatan



Energy and Resources Management Demonstration – Siemens, Jerman



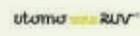
Smart Building Demonstrations – Honeywell, IBM, Cisco, Motorola, Autodesk, ESRI, Amazon Web Service; Amerika Serikat



City Intelligent Operations Center Demonstrations – Huawei, Tiongkok



Smart Infrastructure Demonstrations – Smart City Innovation Cluster, Finlandia



Solar Panel and EV Charging – Utomo SolarUV, Indonesia



Smart Transportation and Traffic Management – Sergek, Kazakhstan



Fellowship on Spatial Analytics Platform Development – ESRI, Amerika Serikat

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya



1.114

warga mengikuti kegiatan pelatihan *upskilling* dan *reskilling*



417

UMKM binaan Otorita IKN bekerja sama dengan lembaga lainnya



140

warga mengikuti pelatihan non vokasi



30

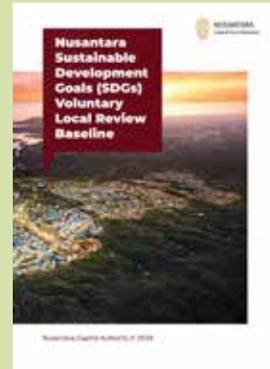
peserta pelatihan *Coding Mom* di Desa Digital Bukit Raya, Sepaku



19

peserta pelatihan *Solar Mom* di Desa Digital Bukit Raya, Sepaku

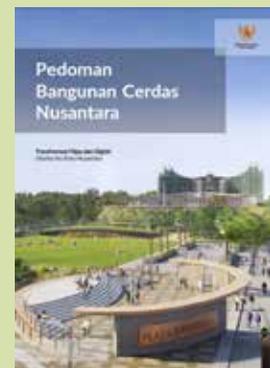
Pembuatan Peta Jalan dan Strategi Pembangunan



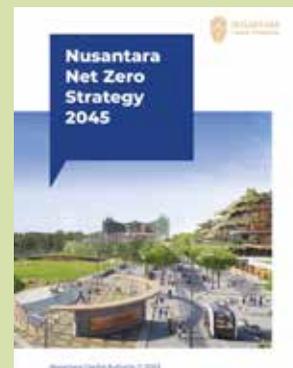
Nusantara *Sustainable Development Goals (SDGs) Voluntary Local Review Baseline*



Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara



Pedoman Bangunan Cerdas Nusantara



Nusantara Net-Zero Strategy 2045



Pembentukan Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)



ESG (Environmental, Social, and Governance) merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan maupun usaha yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola. Komite ESG untuk Otorita IKN dibentuk untuk memastikan pengelolaan kawasan IKN berjalan sesuai standar ESG. Anggota komite terdiri dari pakar lingkungan, sosial, tata kelola pemerintahan, dan manajemen. IKN merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki komite ESG-nya sendiri.

Peluncuran Nusantara Net-Zero Strategy



Otorita IKN meluncurkan peta jalan untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2045, lebih awal dari target nasional Indonesia. Peluncuran ini dilakukan pada Konferensi Perubahan Iklim Dunia ke-28 (COP-28) Perserikatan Bangsa-bangsa di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3 Desember 2023.

Kerja Sama Penguatan Kelembagaan



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kerja sama dalam memastikan penegakan HAM dalam setiap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Kerja sama konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi SDM untuk membantu proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan IKN.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Kerja sama dalam membuat peta dasar yang dapat digunakan untuk perencanaan IKN ke depan. Sebagai dasar penyusunan dan pemetaan tematik, pemetaan bencana, dan pemetaan investasi.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sampai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.



BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Kerja sama dalam penyelenggaraan riset dan inovasi yang sejalan dengan rencana pembangunan IKN serta mendukung pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) IKN.



Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kerja sama dalam menyiapkan strategi keamanan siber di IKN. Kerja sama ini meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas keamanan siber, kampanye dan literasi keamanan siber, pengembangan SDM, dan pertukaran informasi.

Daftar Peraturan dan Surat Edaran Kepala Otorita IKN Tahun 2023

14 Peraturan dan Instruksi Kepala Otorita IKN

- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) IKN Barat
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur 1
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur 2
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Selatan
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Utara
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Simpang Samboja
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kuala Samboja
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Muara Jawa
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara
- Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
- Instruksi Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilahan Sampah dan Pengurangan Sampah Plastik di Lingkungan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara dan Lokasi Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- Instruksi Kepala Otorita IKN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

14 Surat Edaran Kepala Otorita IKN

- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 tentang Penetapan Buku Panduan *One Map, One Planning, One Policy* (1 MPP) sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 02/SE/Kepala-Otorita IKN/XI/2022 tentang Penetapan Panduan *Ad Interim* terkait Tata Kelola Penyampaian Informasi kepada Calon Investor di IKN
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 03/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 tentang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 04/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 tentang Persiapan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: SE. 5/KA/OIKN/III/2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pelaksanaan Lembur dan Pemberian Uang Makan kepada ASN dan Non ASN di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 06/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023 tentang Larangan Menerima, Meminta dan/atau Memberi Gratifikasi di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 07/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Nomor SE-008/OIKN.3/2023/tentang Penghentian Masa Berlaku Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Sesuai dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 009/SE/Kepala-Otorita IKN/VII/2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 010/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 tentang Langkah-Langkah Strategis Akhir Tahun Anggaran 2023
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 011/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 012/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 tentang Penataan Perizinan Tambang dan Perkebunan di Wilayah Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 013/SE/Kepala-Otorita IKN/XI/2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
- Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor: 014/SE/Kepala-Otorita IKN/XII/2023 tentang Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara

LIMA TAHAP PEMBANGUNAN IKN 2022-2045



2022-2024

Tahap pertama merupakan pemindahan tahap awal pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam tahap ini, pembangunan meliputi antara lain Istana Presiden, kantor kementerian koordinator, serta pembangunan ekosistem pendukung seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Pemindahan tahap awal ASN juga dimulai di tahap ini.

2025-2029

Tahap ini fokus pada area inti seperti fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder yang dalam jangka waktu ini langsung bisa digunakan. Kemudian, perluasan kawasan untuk permukiman ASN dan TNI/Polri, perkantoran pemerintah pusat, pengembangan riset dan talenta, universitas unggulan, pembangunan lautan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Pemindahan ASN diperkirakan sudah dapat diselesaikan tahun 2029.

2030-2034

Untuk tahap III pembangunan IKN mulai dilakukan pengembangan kawasan industri dan jaringan transportasi. Fokus pembangunan di rentang waktu ini adalah mengembangkan utilitas terintegrasi, seperti pembangunan jaringan transportasi yang terpadu dan komprehensif, serta pemindahan personel TNI/Polri. Tahap ini juga mendorong peningkatan investasi serta kapasitas produksi kluster ekonomi.

2035-2039

Prioritas program di kurun waktu ini adalah membangun infrastruktur dan ekosistem dalam tiga kota (IKN, Balikpapan, Samarinda) tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan. Utamanya adalah pengembangan pendidikan kesehatan, penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Dilakukan juga peningkatan kapasitas dan diversifikasi kluster seiring meningkatnya populasi.

2040-2045

Fokus pembangunan di tahap ini adalah pada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan seperti kereta api di IKN dan daerah di sekitarnya, serta pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi. Mendorong tercapainya nol emisi karbon dan 100 persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.



PROFIL OTORITA IKN

Basic Design Kantor OIKN (Cityhall)
Gambar : Humas OIKN

SEKILAS IKN



Kegiatan Groundbreaking Kantor Otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo, Kepala OIKN Bambang Susantono dan para Menteri di Ibu Kota Nusantara



Lokasi: Bentang alam di IKN



Lokasi: Tampak Depan Bilah Garuda pada Istana Presiden

Lompatan besar transformasi menuju Indonesia Maju, itulah arah dan tujuan pembangunan IKN di bumi Kalimantan. Visi besar itu dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan IKN di Kalimantan menunjukkan identitas nasional yang beragam dan kemajuan Indonesia sebagai suatu bangsa.

Terpilihnya IKN yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak muncul tiba-tiba. Ada riwayat tersendiri. Menurut naskah Salasilah Kutai, kawasan yang ditetapkan sebagai IKN itu pernah menjadi kekuasaan kerajaan Kutai secara berabad-abad. Sejak era Mulawarman abad ke-4 hingga era

Daerah Istimewa Kutai Kartanegara menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di tahun 1960. Kerajaan ini memiliki pengaruh tidak hanya di Kalimantan tapi sampai ke Sulawesi dan Jawa.

Dari sisi geografis, Kalimantan dinilai cocok sebagai lokasi IKN karena aksesibilitas lokasi tinggi serta dekat dengan dua kota besar Kaltim, Balikpapan dan Samarinda. Lahan yang disiapkan untuk kawasan IKN mencapai total

252.660 hektare (ha) daratan dan 69.769 ha perairan laut. Kawasan sekitar IKN memiliki akses jalan tol Balikpapan-Samarinda dan trans Kalimantan.

Dari segi layanan transportasi udara terdapat bandara di Balikpapan dan Samarinda. Transportasi laut didukung oleh Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda.

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Apa yang menjadi urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN? Begitu padatnya masyarakat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta saat ini. Presiden Jokowi pernah mengungkapkan sejumlah alasan mengapa ibu kota negara harus pindah. Kepala Negara menyatakan, urgensi pemindahan ibu kota negara karena beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa sudah begitu berat, seperti beban kemacetan, beban polusi, dan beban kepadatan penduduk.

Puluhan tahun Jawa menjadi sentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditinjau dari jumlah penduduk, 57 persen populasi nasional tinggal di Pulau Jawa (Bappenas, 2019). Sampai 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 59 persen. Selama ini Produk Domestik Bruto (PDB) nasional banyak disumbang dari Pulau Jawa. Di sisi lain, kawasan Kalimantan termasuk wilayah timur Indonesia hanya menyumbang 2 sampai 8,5 persen PDB Indonesia. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN tidak hanya menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Kalimantan, tapi juga Indonesia.

Undang-Undang IKN

Setelah melalui proses pembahasan di pemerintah, DPR, dan uji publik, akhirnya DPR RI pada 18 Februari 2022 mengesahkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Sejalan dengan UU No 3 tahun 2022 dan Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, maka pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahap dari tahun 2022 hingga 2045.

Dijelaskan dalam UU IKN itu, keberadaan IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, *green economy, green energy, smart transportation*, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar bangsa Indonesia.

“Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, *smart city*, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,” demikian Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Program Beranda Nusantara Menuju Ibu Kota Negara Baru yang disiarkan di Radio Republik Indonesia Rabu, 23 Februari 2022, langsung dari studio RRI Nusantara.

Oleh karena itu, IKN dibangun berdasarkan 8 Prinsip Utama Pembangunan IKN, yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika; terhubung, aktif, dan mudah diakses; aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi; rendah emisi karbon; sirkuler dan tangguh; dan peluang ekonomi untuk semua. Prinsip ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sebuah komunitas yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan 4P, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN diberikan kepada lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

Komitmen membangun IKN atas prinsip berkelanjutan disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022. “Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni,

humanis, dan *liveable. A world-class city for all.*” Pembangunan IKN Nusantara menjadi momentum Indonesia untuk memulai inisiatif pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan menjadikan IKN sebagai kota nol emisi karbon.

Sejak awal, dalam konteks pembangunan IKN, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan IKN dibangun dan dikembangkan hanya menggunakan 25 persen kawasan lahan yang ada. Sisanya, akan dipertahankan sebagai kawasan hijau berupa kawasan lindung sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim. Termasuk di dalamnya 10 persen lahan dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Intinya, pembangunan IKN justru melakukan reforestasi atau penghijauan kembali kawasan hutan Kalimantan.

Keberadaan 65 persen kawasan lindung menunjukkan komitmen IKN sebagai kota hutan di mana upaya pemulihan ekosistem hutan dilakukan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. Sikap untuk lebih menekankan pembangunan yang berkelanjutan selalu dikemukakan Presiden Joko Widodo. Kawasan IKN diwujudkan menjadi kota pintar, kota hutan, dan kota *spons*. Artinya, kawasan IKN nantinya mampu menyerap air hujan ke dalam tanah guna mencegah banjir. Konsep kota *spons* sendiri

juga telah tertuang ke dalam Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Konsep *spons* ditujukan untuk mengembalikan siklus alami air akibat pembangunan IKN, serta menjadi wadah bagi ketersediaan air di kawasan tersebut.

Karena itu, dalam pendekatan lingkungan, kota *spons* memiliki sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan IKN juga mengatur aspek beban ekologis dan ekonomis. IKN didesain tidak melebihi batas daya dukung wilayahnya. Karena itu, kawasan ibu kota ini mengusung prinsip konstruksi ramping dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung *zero waste*, seperti *integrated urban water management*, keterpaduan utilitas air dan pengelolaan tata air perkotaan terpadu berdasarkan siklus air perkotaan.

IKN juga diwujudkan sebagai kota cerdas (*smart city*). Oleh karena itu, landasan kota cerdas memiliki peran esensial. Sistem informasi berbasis teknologi menjadi alat utama untuk mendorong efisiensi layanan kota, pengelolaan sumber daya, dan keamanan warga. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek layanan perkotaan, kehidupan warga IKN akan menjadi lebih berkualitas.

“Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan *liveable. A world-class city for all.*”

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

CAPAIAN KINERJA

TIM TRANSISI PENDUKUNG PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (2022)

Capaian Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sepanjang tahun 2023 tidak terlepas dari kinerja yang dibuat Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (Tim Transisi IKN). Tim Transisi IKN dibentuk melalui Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2022 untuk membantu Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Tim ini bertugas mengawal dan berperan aktif dengan unsur-unsur kementerian/lembaga terkait di mana pemindahan Ibu Kota Negara merupakan agenda strategis dan prioritas nasional yang harus mendapat dukungan kesiapan dan komitmen penuh terutama dari kementerian/lembaga. Seluruh tugas Tim Transisi IKN untuk memastikan realisasi dan pencapaiannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan arahan Presiden Republik Indonesia.

Tugas Utama

Tim Transisi IKN dibentuk dengan mengemban tugas utamanya sebagai berikut:

1. Mengkonsolidasikan penyelenggaraan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;

2. Memfasilitasi tindak lanjut arahan/kebijakan Presiden guna memperlancar dan mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
3. Memfasilitasi kegiatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
4. Memberikan masukan mengenai langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
5. Membantu penyiapan dan perencanaan termasuk tetapi tidak terbatas pada penataan regulasi, penanganan isu-isu hukum, dan kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan pihak lain;
6. Mengelola data dan informasi terkait dengan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan pihak terkait;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
8. Membantu penyiapan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; dan
9. Tugas lainnya untuk memastikan realisasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh tugas Tim Transisi IKN adalah untuk memastikan realisasi dan pencapaiannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan arahan Presiden Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Tim Transisi IKN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Ketua Tim Transisi IKN.

Struktur Utama

Struktur Utama Tim Transisi IKN terdiri dari satu orang Ketua Tim Transisi IKN, satu orang Wakil Ketua yang dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari satu orang Sekretaris, Tim Informasi dan Komunikasi, Tim Ahli dan beberapa Bidang koordinasi sebagai berikut:

1. Bidang Koordinasi Perencanaan;
2. Bidang Koordinasi Pengendalian Pembangunan;
3. Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pertanahan;
4. Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim;
5. Bidang Koordinasi Investasi;
6. Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi;
7. Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Bidang Koordinasi Pendanaan; dan
9. Tim Penasihat (yang dibentuk untuk mendukung Tim Transisi IKN dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas Tim Transisi IKN dengan arah kebijakan dan capaian yang dituju).

Selain Struktur utama tersebut di atas, sepanjang tahun 2022 jumlah personel Tim Transisi IKN terus meningkat guna mendukung pelaksanaan tugas utama Tim Transisi IKN. Pada akhir Desember 2022 jumlah personel Tim Transisi mencapai 188 orang yang pembentukannya dilakukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Ketua Tim Transisi IKN.

Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Tim Transisi IKN dan Tim Penasihat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara. Adapun dalam hal pelaksanaan tugas Tim Transisi berkaitan langsung dengan Satuan Tugas atau Tim dari kementerian/lembaga lain, pembebanan anggaran pelaksanaan tugas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembentukan Satuan Tugas atau Tim di kementerian/lembaga tersebut.

Buku Panduan 1MPP

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Tim Transisi IKN melakukan konsolidasi, koordinasi, kolaborasi aktif, dan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal itu untuk menyatukan konsep agar mendapatkan satu pemahaman bersama terkait perencanaan dan pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Hasil dari komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi aktif dengan kementerian dan lembaga tersebut yang dilakukan melalui rapat intensif baik secara tatap muka maupun daring dan berupa kegiatan konsinyering, akhirnya menghasilkan satu pedoman

yang menjadi acuan bersama terkait perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Pedoman tersebut dibuat dalam satu buah dokumen terpadu yang diberi nama: *1 Map, 1 Planning, 1 Policy* (1MPP). Dan untuk dapat diketahui bahwa 1MPP tersebut telah disetujui bersama dan diterbitkan melalui Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: 01/SE/Kepala Otorita IKN/X/2022 tentang Buku Panduan *One Map, One Planning*, dan *One Policy* (1MPP) sebagai pedoman informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terintegrasi lintas Kementerian/ Lembaga, dan Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: 02/SE/Kepala Otorita IKN/XI/2022 tentang Penetapan Panduan Ad Interim terkait Tata Kelola Penyampaian Informasi kepada Investor di IKN.

Penerbitan Perka OIKN

Tim Transisi IKN juga berperan dalam menerbitkan beberapa Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Perka OIKN), diantaranya Perka OIKN No. 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara, dan beberapa Perka OIKN mengenai Rencana Detail Tata Ruang sebagai berikut:

1. Perka OIKN No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
2. Perka OIKN No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat;
3. Perka OIKN No. 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1; dan
4. Perka OIKN No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2.

Selain itu, Tim Transisi IKN juga berperan dalam menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Laporan Kegiatan

Sebagaimana tujuan terbentuknya Tim Transisi IKN, Tim Transisi IKN bertugas dan bekerja sampai dengan akhir Desember 2022. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Tim Transisi IKN telah menyiapkan Laporan Kegiatan Tahun 2022 pada bulan Februari 2023 dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: B.056/Kepala/Otorita IKN/IV/2023, tertanggal 28 April 2023.



Rapat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Tim Transisi IKN antara lain menghasilkan dokumen *1 Map 1 Planning 1 Policy*, yaitu satu pedoman yang menjadi acuan bersama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di IKN.

MENGENAL OTORITA IKN

Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dibentuk untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara, sejak tahap persiapan pembangunan hingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdusus) IKN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023.

Kehadiran OIKN menjadi hal baru dalam pengelolaan pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Secara struktural, Kepala Otorita IKN bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia Indonesia. Atas dasar itu, lembaga OIKN memiliki posisi struktural yang setingkat dengan lembaga kementerian – meskipun OIKN memiliki tugas dan cakupan kekuasaan setingkat Gubernur.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, tugas Otorita IKN adalah melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra melalui penyelenggaraan 28 fungsi yang menghubungkan OIKN dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, instansi kepolisian dan tentara, serta lembaga internasional.

Kewenangan OIKN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 terbagi atas kewenangan umum dan kewenangan khusus. Pada Pasal 2 Ayat (1), ditetapkan kewenangan umum OIKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan absolut/pusat, termasuk dalam urusan pemerintahan absolut tersebut antara lain urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sementara pada Pasal 3 Ayat (1) dijabarkan kewenangan khusus lembaga Otorita IKN dengan rincian lebih detail pada lampiran Perpres yang terdiri atas 68 halaman dan dibagi berdasarkan 31 bidang kewenangan khusus antara lain:

- Pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
- Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai Perpres No 62 Tahun 2022, Otorita IKN membentuk susunan struktural organisasi pimpinan tinggi yang terdiri dari Kepala Otorita IKN, Wakil Kepala Otorita IKN, Sekretaris Otorita IKN, Unit Hukum dan Kepatuhan serta dibantu tujuh kedeputian bidang. Sebagai rekognisi kompetensi masyarakat Kalimantan Timur, berdasarkan Pasal 14 Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN, paling sedikit dua deputi diambil dari unsur masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini terpenuhi dengan dilantikannya Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada 13 Oktober 2022, serta Alimuddin sebagai Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat pada 13 Februari 2023.



Kepala OIKN beserta jajaran pimpinan OIKN berpose bersama usai rapat koordinasi di kantor Otorita IKN Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sampai akhir 2023, pemenuhan kebutuhan pejabat pimpinan tinggi pratama hingga staf fungsional/tenaga ahli ASN maupun non ASN terus dilakukan. Hingga akhir 2023, sudah ada sekitar 300 pegawai yang bekerja di OIKN.

Penguatan Kewenangan Otorita IKN

Seiring dengan kebutuhan percepatan pembangunan IKN, setelah dilakukan evaluasi maka pemerintah dan DPR sepakat menguatkan kewenangan OIKN melalui revisi beberapa klausul dalam pasal-pasal di UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN sehingga menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 yang resmi diundangkan 31 Oktober 2023.

Revisi UU IKN menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 penting agar OIKN bisa bekerja optimal untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan,

dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN atau 4P guna mewujudkan IKN sebagai kota berkelanjutan dan penggerak ekonomi nasional di masa depan.

Melalui pembangunan IKN, pemerintah akan mewujudkan transformasi bangsa Indonesia menuju Indonesia emas pada 2045 dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pembangunan IKN juga diproyeksikan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dengan demikian secara yuridis formal status IKN masuk sebagai prioritas nasional yang berkelanjutan.



Lokasi : Istana Presiden
Foto : Humas OIKN

FONDASI AWAL MENUJU KOTA LAYAK HUNI DAN DICINTAI

Sebagai lembaga yang masih “bayi”, mengawal pembangunan IKN di fase awal ini menjadi sebuah pekerjaan yang menantang bagi Otorita IKN. Dalam hal ini, Otorita IKN terus berupaya melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi bersama para kementerian/lembaga, pemerintah daerah, investor, perguruan tinggi, *non government organization* (NGO), dan masyarakat lokal dengan sumber daya yang ada. Ini sangat penting, karena tanpa dukungan *stakeholder* pekerjaan besar ini sulit terwujud.

Rekrutmen pegawai Otorita IKN terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik yang berlatar belakang ASN maupun non-ASN atau profesional. Mencari talenta terbaik untuk turut membangun IKN tidak mudah. Pembangunan IKN membutuhkan akselerasi. Sementara, kebutuhan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) terkendala jadwal seleksi CPNS yang ketat dan terbatas. Untuk itu pada 2023, Otorita IKN membuka seleksi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan non-ASN.

Pencapaian serapan anggaran Otorita IKN juga sesuai target. Berdasarkan data dari Aplikasi Sakti, selama pelaksanaan anggaran 2023 OIKN telah menerbitkan 2.899 Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nominal sebesar Rp 262,388,895,087 atau 95 persen dari total pagu. Target ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian/lembaga agar anggaran tahun 2023 sedikitnya terserap 95 persen.

Perkembangan Infastruktur dan Investasi

Tercatat persentase perkembangan pembangunan Tahap 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang didanai oleh APBN telah mencapai 71,57 persen per Januari 2024. Pembangunan Tahap 1 tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana dasar yang sedang berlangsung, mencakup pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, gedung kantor pemerintahan,

jalan tol, penyediaan pasokan air minum, pengelolaan limbah, sistem drainase perkotaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta proyek penunjang lainnya. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni pada tahun 2024.

Pembangunan di KIPP juga berlangsung dengan baik. Khusus untuk Kantor Presiden dan Istana Presiden rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 50 persen. Area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai lebih dari 90 persen sementara Bendungan Sepaku Semoi untuk pasokan air baku IKN sudah 100 persen.

Di saat yang sama, investasi swasta juga menunjukkan *progress* yang sangat baik. Hal itu ditandai oleh empat peletakan batu pertama (*groundbreaking*) 1 hingga 4 yang dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. Delapan sektor utama yang dibangun adalah hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Saat meresmikan *groundbreaking* di IKN 20 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemantauan perkembangan sejumlah proyek yang telah dilakukan *groundbreaking* di IKN menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat progres setiap bulannya. Kehadiran Presiden dalam setiap *groundbreaking* IKN menunjukkan kepada publik bahwa ada perkembangan pembangunan di IKN.

Total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun. Selain itu, saat ini sudah ada sekitar 350 *Letter of Intent* yang diterima oleh Otorita IKN dan tengah dikaji. Proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN.

Penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai dengan target untuk mengukir sejarah baru, yaitu merayakan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN.

Kota Hutan Berkelanjutan

Sebagai kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen Otorita IKN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan amatlah penting, terutama untuk memberikan *international confidence* dan juga pembangunan yang berdampak positif.

Sesuai UU IKN dan Rencana Induk Pembangunan IKN, dari 252.660 hektare (ha) luas IKN itu yang dibangun hanya 25 persen. Sebanyak 65 persen menjadi area hutan kembali atau penghijauan kembali (reforestasi). Adapun 10 persen untuk area produksi pangan.

Proses pembangunan dan reforestasi selama pembangunan kawasan IKN juga memerhatikan kondisi lahan yang ada. Sebab, area *existing* kawasan IKN terdiri dari lahan Hutan Tanaman Industri, perkebunan sawit, dan pertambangan. Untuk itu, di tahap I ini, upaya Otorita IKN adalah untuk memastikan bahwa tata ruang ditaati oleh semua pihak. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Kepala Otorita IKN tentang Penataan Perizinan Tambang dan Perkebunan di Wilayah IKN.

Untuk itu, Otorita IKN membentuk Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Aktivitas Ilegal Bidang Pertambangan di Wilayah IKN. Satgas melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), TNI, Kementerian Pusat, dan Pemerintah Daerah. Tugas dari Satgas ini difokuskan pada penertiban kegiatan pertambangan di wilayah IKN yaitu 61 IUP aktif seluas 60.684 ha dengan luas bukaan 17.930 ha dan adanya bukaan seluas 3.795 ha dari aktivitas tambang ilegal.

Langkah lainnya adalah melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebelum pengembangan IKN, tutupan hutan sekunder hanya 10 persen dengan laju deforestasi 1.000 ha/tahun. Tujuan dari Rehabilitasi DAS untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan dengan 75 persen kawasannya berupa ruang terbuka hijau. Luas lahan yang direhabilitasi mencapai 2.300 ha.

Penghutan kembali telah dilakukan di IKN dengan membangun Persemaian Mentawir. Sejak mulai dibangun 2021 Persemaian Mentawir telah menghasilkan 2 juta bibit dari rencana 15 juta kapasitasnya. Bibit yang telah ada 39 jenis antara lain tanaman kayu seperti belangeran, ulin, meranti, balsa, gaharu, nyatoh, nyamplung, tengkawang, jabon, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga tanaman hasil hutan bukan kayu seperti aren, cempedak, duren, jengkol, petai, mangga, manggis, alpukat, sirsak, dan lain-lain, serta tanaman estetika seperti tanjung, flamboyan, tabebuaya, dan pucuk merah.

Kota hutan (*forest city*) dimaknai dengan lanskap terintegrasi yang didominasi hutan atau ruang terbuka hijau guna menyediakan jasa ekosistem hutan sebagai pendukung kehidupan yang berdampingan dan bersinergi dengan alam. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan ekosistem hutan hujan tropis di IKN, dibangun sebuah Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) Nusantara di area Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN. Diresmikan oleh Presiden pada 20 Desember 2023 di atas lahan seluas 98 ha, MHHT Nusantara ditargetkan dapat menjalankan fungsi hutan dan lingkungan, di sisi lain sebagai jendela pertunjukan (*show window*) mengenai proses suksesi hutan hujan tropis kepada masyarakat. Jenis tanaman di MHHT Nusantara ditanam diprioritaskan dari hutan hujan tropis dataran rendah.

Adapun program pengembangan kota berkelanjutan lainnya adalah Nusantara Green Pesantren. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Otorita IKN, Katadata, Benih Baik, Jejakin, Donatur Sabuk Hijau Nusantara, dan Pondok Pesantren. Ini merupakan upaya mendorong gerakan partisipatif dari Pondok Pesantren. Mereka melakukan kegiatan penanaman pohon buah-buahan bersama masyarakat, sekaligus menyusun rencana pengelolaan Nusantara Green Pesantren dengan mengembangkan program pengelolaan tanaman hutan dan pertanian (*agroforestry*), pengelolaan perikanan di area *mangrove (silvofishery)*, *green building* menggunakan *solar panel*, dan sistem panen air hujan (*rainwater harvesting*).

Otorita IKN juga telah meluncurkan Nusantara *Net Zero Strategy 2045* di COP-28 di Dubai, dan akan meluncurkan *Nusantara Nature Positive Plan* (Rencana Induk Keanekaragaman Hayati) yang selaras dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Strategi ini selaras dengan tujuan IKN sebagai kota dengan nol emisi di 2045. Selain itu, Otorita IKN juga telah meluncurkan *Voluntary Local Review (VLR)* untuk pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) IKN.

Otorita IKN juga membentuk Komite *Environmental, Social, and Governance (ESG)* untuk memandu pembangunan IKN agar terus sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola internasional. IKN merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Komite ESG. Anggota komite ini terdiri dari para pakar lingkungan, sosial, tata kelola pembangunan, dan manajemen.

Sebagai kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen Otorita IKN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan amatlah penting.

Transformasi Hijau dan Digital

Prinsip IKN sebagai kota cerdas juga tengah direncanakan dan diimplementasikan. Perencanaan ini memiliki dasar beragam kajian, studi, dan juga diskusi dengan berbagai para ahli. Hal tersebut untuk menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna, agar masyarakat yang tinggal di IKN merasa betah dan nyaman, sebagai kota yang layak huni dan dicintai (*liveable dan lovable city*). Salah satu perwujudan ini terlihat pada Rumah Teknologi Nusantara yang berada di IKN. Destinasi ini akan menjadi salah satu wadah untuk melakukan *proof of concept* atau pengujian konsep teknologi. Dengan demikian, pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai teknologi kota cerdas yang akan diterapkan di IKN.

Pihak Otorita IKN akan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi di dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan IKN ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menyangkut pemanfaatan teknologi, capaian dari Otorita IKN di 2023 adalah sudah menerbitkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Dokumen ini disusun oleh tim Otorita IKN bersama para pakar kota cerdas yang berpengalaman.

Disebutkan dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara itu, Otorita IKN selaku Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mempunyai enam ruang lingkup (*domain*) pelayanan dan aplikasi dalam teknologi, mulai dari tata kelola cerdas (*smart governance*), transportasi dan mobilitas (*transportation and mobility*), kelayakhunian (*smart living*), sumber daya alam dan energi (*natural resource and energy*), industri dan SDM (*industries and human resources*), serta infrastruktur dan lingkungan terbangun (*built environment and infrastructure*). Dari ruang lingkup itu diturunkan menjadi 21 subdomain yang menghasilkan 67 fitur Kota Cerdas.

Desain Kota Cerdas Nusantara ini memang dibuat selaras dengan kampanye global mengenai perubahan iklim. Otorita IKN sudah memaparkan pembangunan IKN sebagai bagian komitmen Indonesia dalam berperan aktif untuk menanggulangi krisis iklim, sebagaimana ditegaskan di COP-28 di Dubai tahun lalu. Pembangunan IKN akan seiring dengan upaya pengendalian perubahan iklim melalui sektor energi dan industri hijau, *Forestry and other Land Use (FoLU) Sink*, dan pertanian.

Upaya mewujudkan *smart city* juga melibatkan masyarakat sekitar IKN. Otorita IKN bersama Telkom Indonesia menginisiasi desa digital yang berlokasi di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Desa ini sudah menerapkan pelayanan publik publik dan pemasaran *online* produk warga desa, juga ada pengajaran mengenai literasi digital. Desa Bukit Raya menjadi pusat percontohan desa lain di kawasan IKN.

Pemberdayaan Masyarakat

Selain menjadi kota hijau dan cerdas, IKN juga sejak awal bertekad untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota baru ini. Ini termasuk dengan mendorong partisipasi warga lokal yang telah lebih dulu tinggal di kawasan ini.

Untuk itu, Otorita IKN melakukan akselerasi pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Sasarannya mulai dari usia dini, kelompok usia produktif, hingga lanjut usia. Termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat adat Kalimantan Timur.

Pengembangan jurusan vokasi diperkuat dengan melibatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kawasan IKN untuk memenuhi kebutuhan pengembangan IKN ke depan. Otorita IKN juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan yang peduli terhadap pendidikan seperti renovasi SDN 020 Sepaku yang melibatkan Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim dengan desain sekolah yang lebih modern dan menyesuaikan dengan alam. Guru-guru di kawasan IKN juga dipersiapkan menjadi pengajar multitalenta. Otorita IKN bersama Kemendikbudristek telah melibatkan 900 guru PAUD hingga SMA untuk meningkatkan potensi mereka agar bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat seiring dengan perkembangan IKN.

Menyangkut program pemberdayaan masyarakat, Otorita IKN sudah melatih peningkatan keterampilan bagi 1.114 warga sekitar IKN sejak tahun 2022 sampai 2023. Terdapat 417 UMKM binaan IKN yang telah difasilitasi dan diajukan sertifikasinya seperti kemampuan ekspor serta produk halal. Bidang non vokasi seperti jasa penginapan dan *hospitality* juga diberdayakan, di mana 140 warga sekitar IKN telah diberi pelatihan di bidang ini.

Potensi ekowisata IKN juga dikembangkan. Pihak Otorita IKN sudah menginventarisir lokasi wisata alam di sekitar IKN. Selain hutan tropis, kawasan IKN juga mempunyai hutan *mangrove* yang luas dan daerah pesisir. Selain itu, potensi wisata kesehatan dan kebugaran (*wellness*) dengan keberadaan rumah sakit bertaraf internasional serta potensi tanaman herbal. Ini juga menjadi daya tarik IKN.

Otorita IKN juga telah membuat program wisata pengenalan (*famtrip*) ke Berau, untuk merasakan wisata bahari di Pulau Maratua dan adat budaya di sana. Hal ini sebagai upaya mengembangkan kerja sama wisata dengan daerah mitra IKN seperti Samarinda dan Kutai Barat dengan potensi keragaman budayanya.

Kemitraan dan Kerja Sama Internasional

Pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan dari dunia internasional, termasuk dukungan dari lembaga-lembaga pembangunan terkemuka seperti USAID dan Asian Development Bank. Selain itu, 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti UNDP, UN-Habitat, dan UNICEF telah menyatakan dukungan bagi pembangunan IKN sesuai bidang keahlian masing-masing.

Ruang lingkup kerja sama dengan lembaga internasional ini antara lain termasuk perencanaan dan pembangunan kota, termasuk *Voluntary Local Review*, dukungan terhadap mekanisme dan kebijakan tata kelola; dukungan digitalisasi; pengembangan Rencana Induk IKN; dan analisis berbagai potensi kesenjangan yang ada.

Kemitraan juga dijalin dengan enam perguruan tinggi negeri. Otorita IKN telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Begitu pula kerja sama dengan universitas luar negeri, seperti Stanford Doerr School of Sustainability (Amerika Serikat) dan University of Turku (Finlandia), menjajaki membentuk konsorsium bersama kampus Belanda, antara lain Universitas Leiden, Delft, dan Erasmus Rotterdam. Kampus-kampus luar negeri ini bersedia memberikan pendampingan di dalam pengembangan desain kawasan hijau dan keanekaragaman hayati yang ada di IKN.

Presiden RI juga telah meresmikan Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN. Proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dan mendapatkan dukungan anggaran Rp85,6 miliar dari FIFA kepada PSSI.

Adapun dari seluruh capaian pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, investasi, dan kemitraan di IKN selama 2023 adalah buah dari kerja bersama. Pembangunan IKN merupakan hasil kolaborasi semua pihak, bukan saja pemerintah namun juga akademisi, LSM, pihak swasta, dan komunitas internasional. Presiden RI memberikan dukungan penuh terhadap Otorita IKN dalam mengawal persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Dukungan Presiden RI dan para mitra tersebut menjadi energi bagi Otorita IKN selama 2023 ini mewujudkan fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045.



IKN MEMACU PERTUMBUHAN

Lokasi : Kantor Kementerian Koordinator
Foto : Humas OIKN

Konsep pembangunan Kota Nusantara sebagai kota *Smart and Sustainable Forest City* dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan bagian timur menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Kehadiran IKN membuat efek berantai. Berbagai macam bisnis bergulir mulai dari bahan bangunan, konsumsi, transportasi hingga kebutuhan logistik. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sirkulasi ekonomi di kawasan IKN bergerak kencang sejak pembangunan dimulai tahun 2022.

Adanya IKN juga mendorong mobilisasi kegiatan masyarakat dan perjalanan dinas pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah di wilayah Balikpapan yang terpantau terus meningkat sehingga mendorong sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini terlihat pada aktivitas bandara yang menunjukkan peningkatan volume penerbangan hingga 15 persen. Geliat perekonomian dan banyaknya pekerja yang masuk ke kota Balikpapan juga akan memperkuat sektor perdagangan yang merupakan penyumbang produk domestik regional bruto PDRB tertinggi keempat di Kalimantan Timur. Hasil survei penjualan eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan indeks penjualan sebesar 8,4 persen

Pembangunan IKN melibatkan sumber daya manusia (SDM) setempat. Di sinilah peran kunci Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai penanggung jawab pembangunan IKN untuk mengangkat kapasitas masyarakat sekitar IKN. Mengembangkan pendidikan vokasi dan mengenalkan IKN sejak dini menjadi upaya menaikkan kapasitas masyarakat. Termasuk mendorong digitalisasi di tingkat desa sehingga tumbuh inovasi-inovasi baru berbasis kearifan lokal.

Konsep pembangunan Kota Nusantara sebagai kota *Smart and Sustainable Forest City* dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan terbentuknya OIKN salah satunya fokusnya adalah melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membekali warga dengan kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam memperbaiki kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membekali warga dengan kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam memperbaiki kehidupannya.

Tidak hanya itu, untuk mewujudkan kota yang memegang prinsip berkelanjutan Otorita IKN menyiapkan sumber daya masyarakat dan infrastruktur yang mendukung transformasi hijau serta mendorong masyarakat agar sadar lingkungan dan memahami bahwa ke depan kawasan IKN akan lebih banyak memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT).

Untuk itu, Otorita IKN terus menyiapkan masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi wirausaha. Masyarakat dibekali berbagai keterampilan. Pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, dengan mengakomodir apa yang dibutuhkan dan menarik bagi masyarakat yang berada di wilayah Kota Nusantara.

Selama tahun 2023, setidaknya sudah lebih dari 1.200 warga sekitar IKN yang mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut. Perlahan tapi pasti dampak positif kehadiran IKN mengubah hidup masyarakat. Agar mereka tidak menjadi penonton di ibu kota negara baru. Berikut ini beberapa potret warga sekitar IKN, baik yang tersentuh program *upskilling* bagi pelaku usaha maupun usahanya yang terangkat karena pembangunan IKN.



DAMPAK EKONOMI

Kelompok Hidroponik Nusantara



Hasil usaha warga Sepaku yang tergabung dalam kelompok Hidroponik Nusantara.

Lima orang perempuan tangannya sibuk menanam bibit pokcoy dan selada di pipa-pipa yang dialiri air. Secara bergantian mereka bekerja di 4 *green house*, rumah produksi tananam hidroponik. Ibu-ibu tersebut tergabung dalam Kelompok Petani Nusantara, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Mereka merupakan alumni pelatihan program pelatihan bercocok tanam hidroponik di kawasan Ibu Kota Nusantara yang diinisiasi Otorita IKN bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Samarinda pada Juli 2022 dan Agustus 2022. Sejumlah warga di kawasan Nusantara, khususnya di Desa Sukaraja, kini sukses meraih keuntungan dari tanaman hidroponik.

“Berkat pelatihan saya sukses menanam pokcoy dan selada, sekarang setiap panen saya bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp8 juta/bulan atau sekitar

Rp3-4 juta setiap kali panen,” kata Sri Sudarwati, salah satu anggota Kelompok Hidroponik Nusantara. Perempuan berusia 47 tahun ini merupakan warga asli Sepaku. “Saya lahir di sini jadi bisa dibilang orang asli, orang tua saya transmigran dari Jawa,” kata Sri yang sebelumnya selama 16 tahun pernah menjadi pegawai honorer di Kutai Kartanegara.

Setelah tak lagi menjadi pegawai honorer, Sri tertarik untuk pulang kampung ke Desa Sukaraja untuk membuka usaha pada tahun lalu. “Karena rumah saya berada di wilayah IKN, selain ingin merawat orang tua, saya melihat ada peluang usaha,” katanya. Namun, dia masih bingung mau usaha apa. Sambil berpikir, dia mencoba menanam sayuran secara hidroponik dengan dukungan dari keluarga. “Awalnya hobi saja, *Alhamdulillah* Juli tahun lalu ada pelatihan, lalu saya ikut. Jadi saya merasakan manfaat dari pelatihan itu.”

Bersama 32 warga lainnya, Sri mengikuti pelatihan berkebun hidroponik tahap pertama pada Juli 2022. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi masyarakat (*upskilling*). Tujuannya masyarakat lokal bisa berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara dan merasakan langsung manfaatnya secara ekonomi. Selain keterampilan hidroponik juga ada pelatihan lain seperti menjadi barista, menjahit, membatik, serta membuat kue dan roti.

Banyak warga Sepaku yang tertarik ikut pelatihan hidroponik, karena selain relatif mudah dan tak perlu modal atau area yang luas. “Awalnya coba dengan satu meja dulu, eh ternyata bisa mendapatkan Rp1 juta,” ujar Sri. “Wah lumayan juga, sejak itu saya semakin serius untuk mengembangkan dan mengajak teman-teman lain, yang warga sekitar sebanyak 12 orang.”

Lastri, anggota Kelompok Hidroponik Nusantara, mengaku senang mendapatkan penghasilan tetap dari hidroponik ini. Ia dan teman-teman kelompoknya juga memiliki kebun hidroponik di rumah masing-masing, padahal ia sebelumnya tidak punya keterampilan apa pun soal hidroponik.

Selama ini, para petani yang tergabung dalam Kelompok Hidroponik Nusantara memasarkan sendiri hasil kebunnya ke pasar Sepaku. Awalnya para pedagang

menolak karena harganya cukup tinggi dibandingkan sayuran yang non-hidroponik. Para petani menjualnya seharga Rp8 ribu per pak, isinya sayuran dari 3-4 lubang tanam. Namun lambat laun, hasil kebunnya diterima dan laris. Bahkan kesulitan memenuhi permintaan pasar.

Menurut Sri, seiring dengan pesatnya pembangunan IKN semakin banyak pekerja yang datang membuat kebutuhan sayuran meningkat. Inilah yang membuat sayurannya selalu habis. “Padahal potensi pasar masih besar, ada kebutuhan salada di Balikpapan yang belum bisa dipenuhi, ada permintaan 100-200 pak setiap hari,” ujarnya.

Mereka telah mendapatkan dukungan membangun tambahan *green house*. Dukungan dari pihak swasta tersebut selain telah meningkatkan kapasitas produksi juga mendorong masyarakat lainnya tertarik untuk mengembangkan pertanian hidroponik. Sebagai sebuah transformasi dari pertanian desa menjadi pertanian perkotaan (*urban farming*). Mengingat permintaan pasar yang tinggi, petani hidroponik di IKN juga makin berkembang. Saat ini, alumni pelatihan hidroponik sudah melatih secara mandiri kepada 8 orang lainnya. Dengan demikian, investasi yang dilakukan oleh OIKN bersama kementerian/lembaga lainnya dan juga swasta telah berdampak positif bagi masyarakat.



“Berkat pelatihan saya sukses menanam pokcoy dan salada, sekarang setiap panen saya bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3-4 juta.”

Sri Sudarwati, anggota Kelompok Hidroponik Nusantara

Batik Tulis Nusantara

Kantor BUMdes Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diubah menjadi lokasi pembuatan batik. Sejumlah perempuan paruh baya sedang sibuk menjemur kain dan sambil memoles warna. Dua orang lagi sedang duduk sambil memegang canting melukis motif batik kain yang dipegangnya.

Nuryati menceritakan, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Batik Nusantara, mereka awalnya tidak mempunyai keterampilan membatik. Mereka tertarik begitu ditawarkan pelatihan membatik oleh Otorita IKN bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.

Pelatihan batik tulis itu masuk dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) *Mobile Training Unit* (MTU) yang dikelola BPVP pada tahun 2022 dan 2023.

Bantuan yang diberikan OIKN bersama BPVP tersebut dirasakan oleh masyarakat di beberapa desa lainnya yang telah menghasilkan batik tulis dan cap dengan corak yang beragam seperti kendi tumbuh dan tanaman pakis.

Otorita IKN juga telah memberikan dukungan berupa peralatan batik kepada masyarakat. Dukungan peralatan juga didapat dari PT Pupuk Kaltim dan dukungan rumah produksi/galeri dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Dukungan ini menjadi salah satu bentuk perwujudan *social impact investment* dari pihak BUMN dan swasta berupa investasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setelah pelatihan tersebut, Nuryati mengumpulkan 16 ibu rumah tangga warga sekitar Desa Argo Mulyo yang berminat membuat usaha batik. “Kami mulai membuat batik sejak November 2023. Dan sudah banyak pesanan. Awalnya dengan modal sendiri Rp6 juta,” urai Nuryati.

Motif khas Kelompok Batik Nusantara ini adalah Merica. Produksi mereka diberi merek ‘Batik Semoi yang melambangkan kejayaan masyarakat Sepaku Semoi menanam merica. Komoditas pertanian merica menjadi andalan usaha yang mendatangkan kesuksesan bagi warga Sepaku. “Kami membuat motif batiknya kombinasi dengan daun, tanaman khas Kalimantan, satwa Kalimantan seperti Menjangan dan Burung Enggang. Setiap kain ada motif mericanya,” jelasnya.

Produksi kelompok ini kebanyakan batik kain. Meskipun bisa menerima pesanan baju batik melalui kerja sama dengan penjahit konveksi.

Selama ini, para pegawai di Sepaku maupun pengunjung IKN membeli kain produksi Batik Nusantara. Rata-rata mereka membuat 10 lembar kain batik tulis maupun batik cap yang membutuhkan waktu penyelesaian 12 hari. Dalam sebulan dapat diproduksi 70 lembar kain batik yang dijual dengan harga mulai dari Rp360 ribu hingga Rp600 ribu.

“Kami terus memproduksi. Tidak tergantung order. Karena sejak adanya pembangunan IKN, produk kami laku keras. Semoga adanya IKN membuat usaha kami lebih maju lagi,” jelas Nuryati seraya bersyukur dari batik tulis ini mereka bisa menambah penghasilan keluarga.

Pihak OIKN bersama pemerintah daerah serta instansi terkait juga terus mendorong pemasaran dari Batik

Nusantara ini dan produk batik khas Kaltim lainnya, termasuk memberikan kesempatan bagi pengusaha batik ini mengikuti pameran di Kalimantan dan Jakarta.

Dengan harapan, produk batik dari kawasan IKN bisa dikenal tidak hanya pasar nasional namun juga sampai mancanegara.



“Kami terus memproduksi. Tidak tergantung order. Karena sejak adanya pembangunan IKN, produk kami laku keras. Semoga adanya IKN membuat usaha kami lebih maju lagi.”

Nuryati, pengusaha Batik Nusantara di Desa Argo Mulyo, Sepaku

Partini, Penjual Suvenir IKN Pasar Rebo

“Salam Nusantara,” begitu sapa dua perempuan karyawan toko AHM Aji Collection, menyambut kedatangan tamunya. Toko itu tidak hanya menjual pakaian khusus perempuan, namun juga souvenir khas IKN. Toko yang berada di Pasar Rebo, Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bisa dikenali karena memajang tas dan pakaian bercorak IKN. Persis di depan pintu masuknya, berdiri tiga manekin mengenakan kaus bergambar Pohon Hayat, logo resmi IKN.

Ketiga kaus itu berbeda warna dan gambar. Kaus yang berwarna hitam dan hijau *army*, bergambar tulisan *Wonderful of Nusantara*, IKN: ibu kota negara. Sedangkan yang warna putih berlukis Pulau Kalimantan yang dibubuhi tulisan Titik Nol IKN.

Partini, 39 tahun, pemilik toko AHM Aji Collection menceritakan awal mula menjual pakaian bercorak IKN sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan daerahnya menjadi wilayah dari ibu kota negara pada 2019. Kaos-kaos bercorak IKN yang diberikan Presiden kepada masyarakat Sepaku menjadi inspirasinya. Dari situ, ia membuat desain sendiri lalu bersama grup senamnya beraksi di Titik Nol Nusantara, lantas jadi viral kausnya. Sebelumnya ia hanya berdagang pakaian dan asesoris berkeliling dan menjadi agen produk pakaian. Sampai mendirikan toko di 2006 “Ya, saya hanya mencoba menangkap peluang,” kata Partini.

Perempuan asli Sepaku itu mengaku, semua gambar di produk-produk IKN didesain timnya. Sedangkan kaus diproduksi di sebuah percetakan di Pulau Jawa dengan bahan kain *cotton combed 24s*. Untuk kaus ukuran anak, harganya mulai Rp42 ribu sementara ukuran dewasa dibuka dari Rp85 ribu.

Tak hanya kaus, AHM Aji Collection juga menjual tas selempang bercorak Nusantara dan *tote bag* IKN. Ada pula kemeja batik, kaus bergambar bukan IKN, hingga busana perempuan dan laki-laki.

“Yang jelas, konsumen yang datang sekarang bukan hanya warga Sepaku. Pak Bambang Susantono (kepala Otorita IKN) saja pernah ke sini,” ungkap Partini sambil memamerkan fotonya dengan Bambang Susantono yang terpajang di tokonya. Selain menjual di toko, ia juga memasarkan produk-produknya secara daring.

Sejak mulai bergulirnya pembangunan IKN pada 2022, Partini menceritakan, pendapatan tokonya melonjak hingga 250 persen per hari. Sebelumnya sekitar Rp2 juta-Rp3 juta perhari sekarang bisa sampai Rp10 juta. Pembeli umumnya dari pengunjung Titik Nol Nusantara, baik lokal maupun asing hingga para pekerja proyek IKN untuk souvenir di kampungnya. Bahkan, ada pesanan juga dari Jakarta.

“Apalagi sekarang banyak kegiatan dari Otorita IKN maupun lembaga lainnya. Ada yang pesan 3-10 lusin bahkan pernah sampai 20 lusin. Itu untuk pelatihan IKN di Grand Senyur Balikpapan,” ungkapnya.

Pihak Otorita IKN sendiri juga memberikan fasilitas kepada Partini. Produk-produknya kini dijajakan di *Rest Area* IKN dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di kawasan inti IKN. “Ini bentuk kontribusi saya kepada IKN, cinta tanah air dan membantu *branding* IKN.”



Pedagang produk souvenir IKN di Pasar Rebo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.



“Ini bentuk kontribusi saya kepada IKN, cinta tanah air dan membantu *branding* IKN.”

Partini, Penjual Suvenir IKN Pasar Rebo

Berharap Kerupuk Amplang Jadi Oleh-Oleh Resmi IKN



Perajin kerupuk amplang di Desa Argo Mulyo, Sepaku.



Tak lengkap rasanya berkunjung ke Kalimantan Timur kalau tidak mencicipi kerupuk amplang. Penganan ringan yang diolah dari *fillet* ikan, telur, bawang putih, dan tepung tapioka. Umumnya amplang memakai bahan ikan tenggiri dan menjadi makan ringan khas Kalimantan Timur.

Seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), para pelaku UMKM di Kecamatan Sepaku, mulai banyak menekuni usaha kerupuk amplang. Salah satunya yang dilakoni Okananti, 50 tahun, produsen amplang bandeng Jo Noleh yang tinggal di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku yang termasuk wilayah pengembangan IKN.

Kenapa menggunakan bandeng? Menurut Okananti, awalnya ia hanya mencoba beberapa produk amplang yang beredar di Kalimantan Timur. Terinspirasi memakai bahan ikan bandeng setelah mengikuti pelatihan UMKM dari pemerintah daerah dan Universitas Balikpapan.

Okananti bersama suami, Mulyono, 55 tahun, memulai merintis usaha amplang bandeng sejak 2018. Awalnya

membuka warung makan, menjual gado-gado, nasi rawon, dan ayam goreng. Lama kelamaan, ia dan suami merasa tidak sanggup mengurus, dan pindah haluan memproduksi kerupuk amplang.

“Mengurus warung makan capek. Lebih enak begini. Jualan amplang. Untungnya lumayan,” ujar Okananti yang akrab disapa Ana itu.

Semenjak itulah, Ana dan Mulyono mulai mencoba membuat olahan amplang bandeng. Selama ini, ia mengambil ikan bandeng dari tambak di Penajam. Seluruh produknya dibuat di rumahnya. Di awal Ana memakai merek ‘Mbak Ana’ sekarang menggunakan merek ‘Jo Noleh’.

Ia bergerak cepat pada 2019 dengan mendaftarkan HAKI merek Jo Noleh, sertifikasi produk halal, izin produsen industri rumah tangga (PIRT). Berkat rajin mengikuti pelatihan dan berdiskusi dengan kelompok UMKM di desanya, kualitas produknya semakin ditingkatkan. Khususnya memperbaiki model kemasan produk (*packaging*). Kerupuk amplang ini merupakan makanan

ringan yang gampang melempem sehingga perlu kemasan yang bikin awet dan menarik buat konsumen. Apalagi produk ini sudah terjual sampai ke luar Kalimantan.

Hingga akhirnya produk mereka difasilitasi Otorita IKN untuk mengikuti pameran produk UMKM di Jakarta, pada 2023. Produk mereka juga dipasarkan dalam pameran UMKN di Titik Nol Nusantara dan Desa Bukit Raya, Sepaku.

Bergulirnya kegiatan proyek IKN dalam dua tahun terakhir membuat produknya makin dikenal masyarakat. Tidak hanya warga sekitar IKN namun sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa.

“Dalam satu hari produksi sekitar 8 kg atau 32 bungkus. Sebulan bisa 1.000-an bungkus lebih, dan itu terserap habis. Produksi tiap hari. Waktu di pameran di Jakarta bawa 30 kg juga habis terjual,” ujar Ana yang merantau dari Sampit ke Sepaku pada 2002.

Warga lokal pada umumnya membeli amplang untuk acara hajatan dan oleh-oleh keluarga. Selain itu, banyak pesanan dari warga Samarinda dan Balikpapan.

Di samping itu, para pengunjung luar IKN juga kerap mampir diarahkan oleh pegawai pemda ke rumahnya untuk memborong kerupuk amplang.

“Begitu ada IKN, pendapatan kami meningkat tiga kali lipat. Terasa ada peningkatan ekonomi buat masyarakat sejak IKN dibangun. Kami merasakan betul *support* dari pemerintah,” ungkap Ana sembari bersyukur bisa mengkuliahkan anaknya dan membeli mobil.

Mengingat tingginya permintaan pasar, Ana meminta Otorita IKN dapat membantu pengembangan usahanya. Memfasilitasi penambahan alat produksi dan permodalan, termasuk pula soal pemasaran.

Satu hal, Ana dan Mulyono mengharapkan agar produk amplang bandeng dijadikan produk resmi kuliner oleh-oleh IKN. Pindahannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dipandang menjadi peluang pelaku UKMM setempat yang harus dimanfaatkan agar mereka bisa menjadi besar.

“Siapa tahu kalau ada tamu negara atau tamu-tamu pejabat datang ke IKN, amplang kami ini jadi suguhan resmi,” jelas Mulyono menambahkan.



“Selama ada IKN, pendapatannya meningkat tiga kali lipat. Terasa ada peningkatan ekonomi buat masyarakat sejak IKN dibangun. Kami merasakan betul *support* dari pemerintah.”

Okananti, produsen Amplang Bandeng Jo Noleh, Desa Argo Mulyo, Sepaku

Menuai Hasil dari Pelatihan UMKM

Beragam aktivitas pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang difasilitasi Otorita IKN membuahkan hasil positif bagi warga Kecamatan Sepaku. Hal itu yang dirasakan Endah Sulistyaningsih, 33 tahun, pengusaha kuliner asal Sepaku.

Usaha kulinernya dengan memproduksi roti dan catering meningkat pesat dalam setahun terakhir semenjak pembangunan bergulir di IKN. Endah mengaku usaha produksi rotinya dan catering meningkat ordernya, bahkan omsetnya naik hingga 100 persen. “Dulu mungkin sekitar Rp600 ribu per hari. Kalau Rp2 juta itu jarang sekali. Lalu, setelah OIKN, jauh bedanya. Bisa, naiknya 100 persen,” jelasnya.

Sebelumnya Endah sempat membuka kafe, namun saat COVID-19 melanda terpaksa tutup. Sementara usaha cateringnya memang sudah beberapa tahun dijalankan berdasarkan pesanan daring. Ia juga sudah membuka kios produk rotinya dan makanan di *Rest Area* IKN. Sejak proyek IKN semakin banyak, setidaknya ada 8-10 pesanan per bulan untuk kebutuhan konsumsi rapat di kantor sekitar IKN.

Endah merasakan kemajuan usaha setelah ditawarkan Otorita IKN untuk mengikuti pelatihan pengembangan UMKM. Sebagai pengelola BUMDes di desanya, ia awalnya mencari warga yang berminat mengikuti pelatihan. Tapi, akhirnya ia mengikuti beberapa pelatihan seperti *Coding Mom* dan pelatihan membuat roti karena ada warganya yang tidak bisa hadir.

Pelatihan pembuatan roti itu memakan waktu paling lama dibandingkan pelatihan lain yaitu 18 hari. Bagi Endah, itu merupakan salah satu pelatihan yang paling bermanfaat.

Satu hal lagi yang dirasakan manfaatnya adalah pelatihan pengemasan produk UMKM. OIKN sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi pengemasan produk UMKM di Sepaku. Para warga, khususnya diajari mengemas produk untuk oleh-oleh khas IKN. Termasuk cara mengurus izin produk industri rumah tangga (PIRT), sertifikasi halal dan izin edar produk UMKM.



“Dulu mungkin sekitar Rp600 ribu per hari. Kalau Rp2 juta itu jarang sekali. Lalu, setelah OIKN, jauh bedanya. Bisa, naiknya 100 persen,” jelasnya.

Endah Sulistyaningsih, pengusaha roti dan catering Kecamatan Sepaku

Meraup Rezeki dari *Frozen Food*

Usman, 47 tahun, sebelum membuka *Deine Adsupa Frozen Food* di Pasar Rebo, Kecamatan Sepaku, berprofesi sebagai petani, bahkan pernah berjualan baju.

Sebagai anak keturunan transmigran asal Madiun, Jawa Timur, Usman mengambil peluang berbisnis daging beku dan juga daging ayam segar sejak 2019.

Bisnis yang ditekuni Usman ini benar-benar dirintis dari awal dengan modal sendiri. Selama ini, suplai daging berasal dari mitra lokal di Sepaku, dan kelapa juga dari perkebunan lokal. Adapun sebagian daging beku didatangkan dari Jawa.

Sejak adanya pembangunan IKN pada 2022, penghasilan Usman meningkat drastis. “Transaksi sebelum terjadi wabah COVID-19 sekitar Rp7-10 juta per hari. Kini sedikitnya mencapai Rp20 juta,” ungkapnya.

Pembeli tokonya saat ini berasal dari catering dan warga lokal termasuk pesanan dari perusahaan-perusahaan di kawasan IKN yang memesan daging beku, daging ayam segar, dan parutan kelapa. “Pernah waktu kedatangan Pak Presiden, rombongan Paspampres banyak yang memesan daging saya,” ujarnya.

Usman berharap dengan keberadaan IKN agar pemerintah serius memerhatikan soal pertanian dan peternakan, mengingat pasokan pangan sangat penting untuk keberlangsungan ibu kota negara. Suplai pangan lokal sampai saat belum memenuhi permintaan pasar sehingga pihak OIKN diminta untuk memfasilitasi hal ini.

“Saat ini petani kita membutuhkan mekanisasi pertanian. Soalnya masih banyak yang manual. Saya punya lahan juga 2,5 hektare tapi enggak sanggup mengurusnya,” tukas Usman.



“Transaksi sebelum terjadi wabah COVID-19 sekitar Rp7-10 juta per hari. Kini sedikitnya mencapai Rp20 juta.”

Usman, Pedagang Daging Ayam dan *Frozen Food*, Pasar Rebo, Sepaku

Bisnis Penunjang Pembangunan IKN jadi Primadona

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah meningkatkan perputaran uang di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan kredit perbankan cukup pesat banyak disumbang dari sektor penginapan, transportasi, kuliner, dan jasa lainnya.

“Saya hampir satu tahun bertugas di Sepaku. Menurut kami, peningkatan perputaran uang dan penyaluran kredit cukup pesat dengan adanya IKN,” terang Hairudin, 41 tahun, Kepala Unit BRI Sepaku.

Dari sisi usaha, masyarakat dan para nasabah BRI Unit Sepaku sebelumnya berkecimpung di sektor pertanian seperti kepala sawit, merica dan karet. Sekarang sudah banyak beralih ke usaha-usaha jasa turunan seperti penyediaan rumah tinggal, jasa angkutan, kemudian juga jasa-jasa turunan lain seperti penatu (*laundry*). “Itu pesat perkembangannya, untuk mendukung kegiatan IKN,” jelasnya.

Yang menarik, ada beberapa usaha baru yang muncul seiring makin banyaknya proyek di IKN, salah satunya pedagang kopi keliling. Saat ini penyaluran kredit didominasi perdagangan seperti rumah makan, *laundry*, penyediaan jasa angkutan, dan tempat hunian. “Lumayan meningkat jumlahnya,” jelas Hairudin.

Sejak pembangunan IKN dilakukan, kebutuhan hunian meningkat. Sejumlah warga tadinya mempunyai tanah sepetak kini beramai-ramai membangun menjadi penginapan atau kos-kosan bagi pengunjung atau pekerja di kawasan IKN. Bisnis ini menjadi primadona warga Penajam Paser Utara, khususnya Sepaku.

Menurut Hairudin, banyaknya warga dari luar IKN telah menyebabkan perputaran uang semakin tinggi. “Orang dari luar pastilah melakukan pembayaran di sini. Artinya, banyak transaksi. Yang tadinya tidak terlalu banyak, jadi naik sangat signifikan,” katanya.

Transaksi ke luar IKN juga mengalami kenaikan karena para pekerja di IKN, mentransfer dananya ke luar Sepaku. Di samping itu, transaksi untuk pembangunan dan pembelian lahan juga menjadi nilai investasi bagi BRI.

BRI Unit Sepaku juga melakukan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, yakni Klaster Salak. Kepada klaster usaha binaan tersebut, pihak BRI telah memberikan pelatihan membuat asinan, dodol, dan kue berbahan dasar buah salak. Selain itu, BRI Unit Sepaku juga telah memberi bantuan peralatan *mixer*, *oven*, dan wajan.

“Kami menyambut baik pembangunan IKN. Harapan kami, ke depan, kami banyak dilibatkan dalam pemberdayaan UKM dan dukungan kredit. Sudah banyak juga nasabah kami, yang mudah-mudahan bisa dilibatkan dalam kegiatan Otorita IKN, baik dalam program pemberdayaan UMKM maupun pemberian kredit,” imbuh Hairudin.

Harapan lain Hairudin, Bank BRI Unit Sepaku dapat dilibatkan juga dalam pembayaran gaji karyawan di lembaga dan perusahaan-perusahaan yang ada di IKN. “Ada beberapa pembayaran karyawan subkontraktor melalui rekening kami, tetapi jumlah tidak signifikan,” pungkasnya.



“Kami menyambut baik pembangunan IKN. Harapan kami, ke depan, kami banyak dilibatkan dalam pemberdayaan UKM dan dukungan kredit.”

Hairudin, Kepala Unit BRI Sepaku



Rumah hunian yang sekaligus menjadi rumah kost untuk disewakan.

Gurihnya Bakso Sepaku

Kasno, 52 tahun, pedagang mie ayam bakso Solo Lek No, Kecamatan Sepaku, kini melebarkan sayap bisnisnya ke Rest Area IKN.

Pria asal Karanganyar, Jawa Tengah ini, sudah tinggal di Kalimantan Timur sejak lulus SD. Sebelum merantau ke Sepaku, Kasno berjualan bakso keliling pakai sepeda motor di Balikpapan. Rumahnya di Balikpapan kini dikontrakkan.

Sejak 2019, ia membuka warung mie ayam di Desa Bumi Harapan, Sepaku. Lambat laun, warungnya semakin laris. Sampai suatu saat Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mampir makan bakso di warungnya, Kasno ditawari mengisi gerai di Rest Area IKN. Awalnya, ia ragu, khawatir sepi pembeli hingga akhirnya November 2023, membuka cabang di Rest Area IKN.

Untuk kios Rest Area IKN, Kasno cukup membayar sewa Rp200 ribu per bulan dan untuk seterusnya Rp100 ribu, serta menyediakan 60-70 mangkok bakso. Sementara, omset penjualan di warung Bumi Harapan sudah mencapai 500 mangkok per hari, sebelum ada IKN hanya sekitar 200-250 mangkok. "Alhamdulillah, untuk di Rest Area sebulan terakhir sudah mulai ramai."

Pembelinya paling banyak adalah pekerja proyek yang terlibat proyek pembangunan IKN. Beberapa kali juga ada pesanan untuk rapat kantor-kantor kontraktor di IKN.

"Saya mengharapkan ke depan IKN makin maju dan ramai. Fasilitas rumah sakit dan pendidikan ditingkatkan. Juga Rest Area IKN agar segera dilengkapi fasilitasnya. Saat ini air bersih sudah lancar di sini," tukas Kasno.



"Saya mengharapkan ke depan IKN makin maju dan ramai. Fasilitas rumah sakit dan pendidikan ditingkatkan. Juga Rest Area IKN agar segera dilengkapi fasilitasnya. Saat ini air bersih sudah lancar di sini."

Kasno, pedagang bakso Lek No, Sepaku

UKM dan Transaksi Nontunai Tumbuh Pesat



"Jadi, UKM ini cukup signifikan untuk bisa menumbuhkan perekonomian di Sepaku, kenaikannya sekitar 13 persen."

Febri Iqbal Saharudin, Kepala Cabang Bank Mandiri Sepaku

Sejak adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perputaran uang dan penyaluran kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sepaku, telah mengalami peningkatan signifikan. Febri Iqbal Saharudin, 28 tahun, Kepala Cabang Bank Mandiri Sepaku menjelaskan peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya kebutuhan kredit.

"Kebutuhan kredit bertambah karena memang perputaran uang dan kebutuhan usahanya juga semakin besar," ungkap Febri Iqbal yang telah bertugas di Bank Mandiri Sepaku selama tujuh bulan.

Dari sisi kredit yang didukung pemerintah, terutama kredit mikro, baik kredit usaha mikro (KUM) maupun kredit usaha rakyat (KUR), sudah banyak yang disalurkan Bank Mandiri Sepaku. Sampai akhir 2023, total penerima KUR Bank Mandiri ada sekitar 590 debitur, sedangkan total penerima KUM sekitar 170-an debitur.

"Jadi, UKM ini cukup signifikan untuk bisa menumbuhkan perekonomian di Sepaku, Kenaikannya sekitar 13 persen," ungkapnya.

Sampai saat ini, Bank Mandiri telah melakukan kerja sama dengan IKN untuk pemberdayaan 20 *tenant* binaan di Rest Area IKN serta mendukung program Bank Indonesia (BI) untuk program nontunai (*cashless*) menggunakan QRIS. Kalau di Bank Mandiri, program ini masuk di aplikasi Livin' Merchant. Di luar Rest Area, ada lebih dari 500 yang sudah menggunakan QRIS Bank Mandiri.

"Sejak diluncurkan pada Juli 2023, volume transaksi *cashless* di Sepaku, di Bank Mandiri ada sekitar Rp11 miliar. Jadi, sudah mulai *shifting*. Bahkan, beberapa kalau kita jalan ke Penajam, warga di sana cerita kalau di Sepaku sudah enak ya, sudah *cashless*, dibanding yang ada di Penajam."

Warga Sepaku kini mulai memahami transaksi nontunai. Nilainya sudah cukup signifikan, misalnya dari tanggal 1 sampai 11 Januari 2024, hampir 17 ribu transaksi nontunai. Peningkatan tersebut hanya beberapa bulan saja, sebelumnya, belum sebesar itu.

Bank Mandiri juga sangat mendukung terbentuknya ekosistem *Green Digital Society* di IKN. Salah satu strateginya ialah membangun budaya *cashless*. Bank ini lebih banyak berkecimpung untuk bisa mendigitalisasikan *smart society*, melalui produk aplikasi layanan mereka. Bank Mandiri juga mendukung penggajian (*payroll*) para pekerja yang tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN.

“Di sana kami dekatkan fasilitas *Point of Service* kami di Kantin 1B, 1C, 1A dan *Site 2*. Di situ kami fasilitasi juga untuk pembukaan rekening, ATM Setor Tarik, *Customer*

Service Machine agar mereka dapat mengganti kartu. Apabila terjadi kendala seperti nomor induk kependudukan (NIK) tidak terdeteksi di Dukcapil, petugas Bank Mandiri Sepaku akan membantu dengan membawanya ke kantor cabang,” jelasnya.

Untuk itu, Bank Mandiri juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pembangunan IKN. Terutama, sejak tahun 2023, mulai pesat pembangunannya. Mereka mendukung kebutuhan finansial pekerja-pekerja konstruksi dari BUMN Karya.

Untuk kehadiran IKN, pihaknya tentu berharap bisa lanjut terus dan menjadi katalisator dalam mendukung perkembangan ekonomi khususnya di wilayah Penajam Paser Utara.



Kantor Bank Mandiri cabang Sepaku siap mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.



Jeli Membaca Peluang dari Pesatnya Pembangunan Nusantara

Pasangan suami istri, Fajar Budi Pranata, 47 tahun, dan Siti Juhariati, 36 tahun, termasuk keluarga yang jeli melihat peluang usaha di kawasan Ibu Kota Nusantara. Mereka membuat penginapan dari hasil ganti untung relokasi rumahnya yang terkena dampak pembangunan kawasan inti IKN.

Penginapannya kini terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Sebelumnya, keluarga Fajar tinggal di wilayah inti IKN yang kini menjadi *Rest Area* IKN dan Rumah Teknologi Nusantara.

“Semua itu berawal waktu tahun 2020, Camat Sepaku mengabarkan ada rencana pemindahan masyarakat untuk proyek IKN,” jelas Fajar.

Menurut Fajar proses pemindahan lahan dan rumah warga berlangsung tidak terlalu lama yaitu tidak sampai dua tahun. Ada sekitar 70 KK di sekitar areal rumah dan

tanah milik keluarga Fajar yang direlokasi waktu itu. Areal yang terkena pembebasan tidak hanya rumah warga, tapi juga lahan perkebunan sawit dan karet.

“Kami punya surat segel dan surat hak milik tanah. Pertemuan dengan warga berlangsung lima kali,” jelas Fajar.

Selain harga tanah dan bangunan, ganti rugi juga diberikan untuk pohon sawit dan pohon karet. Keluarga Fajar menerima ganti untung sebesar Rp1,2 miliar dari luas tanah 20X50 meter dan bangunan rumah. Kendati demikian, selama proses ganti untung sempat dilakukan pengukuran ulang dan gugatan atas nilai ganti untung rumah atau lahan. Dari 70-an warga hanya satu sampai dua warga yang keberatan. Sisanya mengikuti prosedur dan menerima dana ganti untung sesuai kesepakatan.



“Kami membaca peluang karena pesatnya perekonomian sejak adanya proyek IKN.”

Fajar Budi Pranata, pemilik penginapan hasil ganti untung warga sekitar IKN

“Langsung dibayar pemerintah, begitu segala berkas dinyatakan *clear*,” jelas Juhariati.

Saat menerima uang ganti untung dan membeli lokasi rumah yang baru, pasangan suami istri ini langsung berpikir untuk membangun penginapan di Sepaku.

“Kami membaca peluang karena pesatnya perekonomian sejak adanya proyek IKN,” ungkap Fajar.

Sejak 2022, proyek pembangunan IKN mulai bergulir di sekitar Kabupaten Penajam Paser terutama di Sepaku. Semakin banyak pekerja proyek datang dan tamu dari luar Sepaku hilir mudik ke lokasi IKN. Bermunculan hotel-hotel kecil dan rumah warga yang dijadikan penginapan (*homestay*) atau rumah kos.

Lokasi rumah baru Fajar berdekatan dengan mes BUMN yang menggarap proyek penyediaan air baku dan pengendalian banjir di IKN.

Rumah penginapan Fajar terdiri dari lima kamar yang berada di lantai atas, yang menyatu dengan rumah keluarga di lantai bawah, mulai dibangun sejak Agustus 2023. Selain itu, Fajar juga membuka depo air minum isi ulang di samping rumah.

Lokasi penginapan dibangun di lahan milik keluarga. Semua direnovasi total dengan uang ganti untung tersebut yaitu terdiri dari tiga rumah, yaitu dua rumah dihuni orangtua dan adik, sementara satu rumah yang dihuni keluarga Fajar untuk penginapan.

“Selama ini kami tidak menyewakan secara bulanan. Paling lama tiga sampai empat hari sewanya. Kebanyakan tamu-tamu dari instansi pemerintah, pekerja proyek BUMN hingga tim kepresidenan. Setiap bulan kami hampir selalu penuh,” tukas Fajar.

Pasangan suami istri ini merasa terbantu dengan dukungan Otorita IKN dalam pengembangan usaha penginapan yang dikelola warga Sepaku. Mereka setidaknya mendapatkan inspirasi dan keterampilan untuk menentukan usaha yang cocok seiring bertumbuhnya kawasan IKN.

Fajar dan Juhariati menyatakan sudah mendapatkan beberapa pelatihan yang difasilitasi Otorita IKN, antara lain pelatihan perencanaan keuangan, pengelolaan *homestay*, pelayanan tamu, menata kamar, dan kebersihan. Sebagai upaya memberikan standar pelayanan bagi tamu-tamu penginapan di IKN.

Hibah Lahan untuk Jalan Akses

Warga terdampak Proyek Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, merespons baik skema ganti untung lahan yang ditawarkan oleh Otorita IKN.

Eko Supriadi, 49 tahun, pegawai negeri sipil (PNS) setempat, merupakan salah satu warga lokal yang merelakan lahan seluas 255 meter persegi milik keluarganya untuk mendukung pembangunan IKN. Menurutnya, tidak ada resistensi dari warga terdampak. Baginya pembebasan berdampak positif bagi warga Sepaku.

“Sekarang, dampak positifnya, untuk akses jalan. Pembebasan lahan mengurai kemacetan dari pasar, karena satu-satunya akses lewat situ. Ini membuka akses di Patok 8 Sukaraja,” papar Eko yang bertugas sebagai kepala seksi tata pemerintahan di Kecamatan Sepaku.

Sebelum ada IKN, menurutnya, jalan tersebut termasuk jalan usaha tani. “Termasuk sebagian jalan yang ada selebar 4 meter ini berasal dari almarhum Bapak yang menghibahkan lahannya kepada desa untuk dijadikan jalan umum,” tambahnya.

Semasa hidup, ayahnya juga memberi pesan kepada Eko selaku anak tertua dari empat bersaudara untuk mewakili orangtuanya mengurus pembiayaan hingga pembayaran tanah. Mengingat lahan milik keluarganya masuk rencana pelebaran jalan kawasan IKN.

Ia mengaku telah menerima uang ganti untung sebesar Rp119 juta sebagai bentuk kompensasi atas lahannya yang terdampak. “Proses penggantian jalan *bypass* ini cepat, empat bulan, sejak tahap sosialisasi sampai pembayaran. Pembayaran langsung, sekaligus, pada tahun 2022,” terangnya.

Dana kompensasi pembebasan lahan yang diterima Eko dibagi lima. “Separuh untuk pengobatan ibu. Separuh lagi dibagi empat dengan adik-adik,” papar pria asal Jawa yang baru dua tahun tinggal di Sepaku itu.

Dengan adanya pembebasan lahan warga untuk pembangunan IKN, warga terdampak juga mendapatkan nilai lebih. Sebab, harga tanah terus naik sehingga mereka mendapatkan ganti untung dari pemerintah.



“Proses penggantian jalan *bypass* ini cepat, empat bulan, sejak tahap sosialisasi sampai pembayaran. Pembayaran langsung, sekaligus, pada tahun 2022.”

Eko Supriadi, Penerima Ganti Untung IKN

TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

Transformasi SDN 020 Sepaku: Lengkap dan Modern

Siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 020 Sepaku, Desa Bumi Harapan, antusias mengetahui sekolahnya kelak mendapatkan fasilitas di tempat baru lebih lengkap dan modern. SDN 020 Sepaku akan menjadi salah satu sekolah negeri percontohan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekolah ini rencananya akan dipindahkan ke lahan di seberang sekolah dengan dukungan Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR) bersinergi dengan Otorita IKN.

Muhammad Erlangga Albukhori, 10 tahun, dan Khanza Nesya Jidan, 10 tahun, murid kelas lima SDN 020 mengaku sudah mengetahui rencana kepindahan

sekolah mereka. "Tahu rencana sekolah dipindahin, karena banjir," ungkap Muhammad Erlangga Albukhori yang biasa dipanggil Rangga.

SDN 020 memang sudah langganan terkena banjir. Jika malam hujan, paginya pasti sekolah tersebut banjir. "Kalau banjir, biasanya pagi diinfo enggak usah sekolah," tutur Khanza menimpali ucapan Rangga.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, anak ketiga dari empat bersaudara yang biasa pergi ke sekolah menggunakan bus bersama teman-temannya biasanya urung berangkat.



"Kalau sekolah jadi pindah, inginnya seperti sekolah baru, tapi makin seru lagi. Contohnya, ada banyak teman baru dan permainan-permainan favorit."

Muhammad Erlangga Albukhori & Khanza Nesya Jidan, murid SDN 020 Sepaku

Meski sekolahnya kerap terkena banjir, keduanya mengaku senang bersekolah di SDN 020 karena memiliki teman-teman yang baik dan menyenangkan. "Guru-gurunya juga baik, ramah, asyik," kata Khanza.

Baik Rangga maupun Khanza terlihat antusias menanti waktunya belajar di tempat baru. "Kalau sekolah jadi pindah, *pengen* kayak sekolah baru, tapi makin seru lagi. Contohnya, ada banyak teman baru. Kayak ada permainan-permainan favorit *gitu*," kata Khanza.

Mereka berharap fasilitas di tempat baru lebih lengkap, ada kantin, dan ekstrakurikuler juga lebih banyak. Dalam bayangan mereka, di sekolah baru akan ada lapangan besar untuk ekstrakurikuler kasti, sepakbola, basket, bulutangkis, serta ada kolam renang.

Selama ini, Rangga yang bercita-cita menjadi pilot itu mengikuti ekstrakurikuler voli. Saat ini, keduanya telah melek teknologi dan informasi. Mereka sudah bisa menggunakan komputer, laptop, dan internet. Terkait

rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, keduanya mengaku telah mengetahui informasi tersebut. Harapan kedua anak ini, IKN bisa cepat jadi, maju, modern, serta bisa menjadi kota paling bersih se-Indonesia.



SDN 020 Sepaku saat ini.



Rancangan SDN 020 Sepaku yang lebih modern dan futuristik. Sumber Foto: YPA-MDR

Sarinah, 37 tahun, guru SDN 020 Sepaku, selaku wali kelas Rangga dan Khanza mengaku pihak sekolah selama ini amat terbantu dengan dukungan Otorita IKN dan YPA-MDR. Pemandangan sekolah adalah jawaban dari doa-doa para guru dan murid.

Selama ini, lingkungan sekolah sudah tidak layak bagi anak-anak dan pengajar. Selain kerap dilanda banjir, lokasinya berada di pinggir jalan yang banyak dilintasi kendaraan proyek.

“Jadi Astra dan Otorita IKN ini bersinergi, *gimana* ini SDN 020. Anak-anak kan juga ingin dapat suasana belajar yang menyenangkan,” jelasnya.

Menurutnya, pada 2023, para guru juga secara bergiliran mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi mengajar yang difasilitasi Otorita IKN maupun YPA-MDR.

Ke depan, Sarinah berharap, para guru mendapatkan pendalaman teknologi dan informasi serta pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Pasalnya, murid-murid di sekolah ini sudah mengenal *platform* digital. Mereka sudah bisa membuat desain dari Canva dan mengedit video.



Rancangan SDN 020 Sepaku yang lebih modern dan futuristik. Sumber Foto: YPA-MDR

“Dan yang paling penting lagi di bahasa Inggris, karena kita rata-rata kemampuan bahasa Inggris-nya masih minim, terutama guru SD kalau SMP dan SMA kan ada guru bahasa Inggris-nya. Tapi, karena ke depan banyak pendatang, enggak menutup kemungkinan anak-anak yang dari kota ada yang di sekolah internasional. Mereka jago bahasa Inggris. Kalau gurunya enggak *ngerti* kan *gimana*,” jelasnya.

Ke depan, Rangga dan kawan-kawan akan mendapatkan suasana sekolah yang lebih modern dan futuristik. Sebagai upaya transformasi IKN sebagai Kota Cerdas berwawasan dunia.

Satu hal, kendati berada di kawasan ibu kota negara, Sarinah mendambakan sistem pendidikan di Sepaku tidak melupakan kearifan lokal. “Harapan saya, dengan adanya IKN, tidak melupakan kearifan lokal yang ada di sini, walaupun nanti katanya kota dunia untuk semua. Nanti multikultural tapi paling tidak dari masyarakat setempat kayak bahasa Penajam Paser Utara, paling tidak dikenalkan.”



Membangun SDM Siap Pakai

Salah satu kunci utama dari proses pembangunan adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM). Mumpuni atau tidaknya SDM suatu bangsa menentukan arah pembangunan, berkembang maju atau tertinggal dari persaingan global. Untuk itu, keberadaan sekolah kejuruan dan vokasi di kawasan Ibu Kota Nusantara, menjadi strategis. SMK menjadi tumpuan dalam mempersiapkan kompetensi SDM dan rekrutmen tenaga kerja agar mampu terlibat dalam tahapan pembangunan IKN.

Satoni Solle, 50 tahun, Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menyatakan pihaknya bersinergi bersama Otorita IKN untuk menyiapkan SDM untuk membangun IKN.

“Untuk itu, kami membaca peluang-peluang banyaknya tamu-tamu yang akan datang dari Pulau Jawa mutasi ke IKN. Maka kompetensi-kompetensi siswa dari Pulau Jawa masuk ke sini, tentunya harus kami imbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Guru-guru kami, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pendidik. Minimal standar mereka, kalau bisa melebihi,” jelas Satoni.

Satoni merupakan salah satu dari guru yang turut merintis SMKN 1 di Sepaku. Setelah itu, ia ikut mengembangkan SMKN 3 dan SMKN 4 di Kecamatan Waru. Lalu kembali lagi sebagai Kepala Sekolah di SMKN 1. Sekolah kejuruan itu sudah tiga tahun menjadi sekolah pusat keunggulan. Mereka memiliki kelas industri yang memang diharapkan lulusannya dapat diserap ke IKN.



“Kami berharap mencapai standar yang lebih internasional. Dengan kondisi kami yang cukup minim, dalam fasilitas, sarana dan prasarana. Dengan jumlah siswa 700-an dapat menjadi aset bagi Otorita IKN untuk merekrut anak-anak kita.”

Satoni Solle, Kepala Sekolah SMKN 1 Sepaku



Suasana kelas SMK N 1 Sepaku.



Praktikum kerja di SMK N 1 Sepaku.
Sumber Foto: Humas SMK N 1 Penajam Paser Utara

“Kami berharap mencapai standar yang lebih internasional. Dengan kondisi kami yang cukup minim, dalam fasilitas, sarana dan prasarana. Dengan jumlah siswa 700-an dapat menjadi aset bagi Otorita IKN untuk merekrut anak-anak kita. KSP (Kantor Staf Presiden) pun sempat datang. Kita diskusikan bagaimana programnya ke depan dengan Kemendikbudristek, dan lembaga lainnya,” jelasnya.

Jurusan di SMK N 1 ada enam, yaitu Agrobisnis, Akuntansi, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Alat Berat, dan Asisten Keperawatan. Jurusan Asisten Keperawatan adalah yang paling baru. Jurusan Agrobisnis selama ini selalu menjadi unggulan di sekolah ini. Pendirian jurusan dari awal metodenya memang disiapkan untuk menyerap kebutuhan dan perkembangan yang ada, termasuk keberadaan IKN saat ini.

Pihak SMK N 1 juga mengajukan daftar permintaan pembukaan jurusan baru kepada Otorita IKN untuk difasilitasi. Seperti robotik, desain grafis, kelistrikan, mobil listrik. Bisa saja ke depan SMK N 1 bisa menggandeng Tesla dalam pengembangan jurusan tersebut, Satoni berharap.

Menurut Satoni, saat ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan Otorita IKN. Pertama, para guru membutuhkan dukungan pelatihan, menambah jumlah guru khususnya jurusan kuliner dan perhotelan, program untuk sertifikasi profesi, dan memperbanyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Karena itu, perlu disusun adalah program pengembangan SDM melalui SMK dan pendidikan vokasi di IKN. Hal kedua, melengkapi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan jurusan di SMK. Hal yang ketiga adalah memanfaatkan program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan maupun BUMN yang berkiprah di kawasan IKN.

Desa Pintar Bukit Raya

Konsep Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota cerdas atau kota pintar membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. OIKN sudah menginisiasi hal itu dengan mengembangkan desa digital. Berpenduduk sekitar 3.000 jiwa dari 11 desa di Kecamatan Sepaku, Desa Bukit Raya ditetapkan sebagai Desa Digital sejak 18 Agustus 2022 yang diresmikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

“Desa Bukit Raya saat ini menjadi satu-satunya desa di kawasan IKN yang menjadi desa digital,” ujar Adi Suryadi, Sekretaris Desa Bukit Raya.

Otorita IKN bersama PT Telkom menentukan Bukit Raya sebagai desa digital melalui serangkaian survei indikator digitalisasi di masyarakat dari 11 desa yang disurvei, Bukit Raya mencapai nilai tertinggi dalam sejumlah indikator dan dinilai sebagai yang paling siap menjadi desa digital.

Sebelum adanya IKN, Desa Bukit Raya memang sudah memberikan informasi layanan masyarakat melalui

media sosial seperti YouTube dan Facebook, bahkan pada 2018 Desa Bukit Raya mendapatkan penghargaan terbaik Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami juga mendapatkan apresiasi dari Kemendagri karena melakukan debat Pilkada secara live. Ya, mirip-mirip dengan Debat Capres,” imbuh Adi Suryadi.

Dijelaskan Adi, dalam beberapa tahun ini ada tiga aspek digitalisasi yang dikembangkan di Bukit Raya dengan berbagai turunannya, yaitu *Smart Government*, *Smart Society*, dan *Smart Economy*.

Menurut Adi, implementasi dari *Smart Government* ini agar aparat pemerintah pintar mengelola pelayanan pemerintahan, misalnya dulu banyak berkas yang harus dibawa ketika warga desa mengikuti pelatihan yang difasilitasi Otorita IKN di Balai Latihan Kerja. “Kini melalui aplikasi Simpeldesa, cukup mereka men-*download* aplikasi dan mendaftarkan persyaratan di situ sehingga



Gedung Pusat Komunitas Digital Sepaku di Desa Bukit Raya.



Aktivitas Podcast di Studio Pusat Komunitas Digital Sepaku, Desa Bukit Raya.

tidak ada lagi antrean masyarakat saat mendaftar pelatihan,” jelasnya.

Pelayanan Simpeldesa adalah aplikasi digital untuk memudahkan warga desa dalam mengurus surat keterangan domisili atau pengantar ke instansi tertentu. “Tidak sampai hitungan 30 detik suratnya sudah jadi.”

Sebetulnya dalam Simpeldesa juga sudah memuat fitur *Smart Society* dan *Smart Economy* hingga menurut Adi, kegiatan gotong royong, musyawarah desa, dan kegiatan warga desa bisa ditayangkan di media sosial Simpeldesa.

“Ada yang unik, di aplikasi ini ada fitur *panic button* sehingga ketika ada keadaan darurat atau warga mengalami musibah, bisa memakai fitur ini. Langsung terbaca titik koordinat di *google maps* sehingga aparat atau warga terdekat bisa segera merespons ke lokasi,” jelas salah satu pejabat desa termuda di Kalimantan Timur ini.

Fitur *Smart Economy* memfasilitasi transaksi jual beli warga desa, seperti halnya aplikasi *e-commerce* yang beredar di masyarakat dan responsnya cukup baik.

Perangkat Desa Bukit Raya juga melibatkan generasi muda di Sepaku dalam mendorong ekonomi kreatif melalui digitalisasi, salah satunya kelompok Nusantara Creative Hub yang merupakan binaan dari Otorita IKN. “Kegiatan mereka mendorong industri *fashion*, cara mengemas produk UMKM, dan mengajak pelaku UMKM berjualan di Rest Area,” jelasnya.

Pada 2023, Balai Desa Bukit Raya juga menjadi tempat kegiatan pelatihan literasi digital yang diinisiasi oleh OIKN kepada para ibu-ibu dan kelompok difabel. Kegiatannya berupa pelatihan *Coding Mom*, *Coding Difabel*, dan *Solar Mom*.

“Dengan hadirnya IKN, semua ingin jadi pemain utama baik berperan dalam konsep *Smart Forest City*, kota cerdas, dan berkelanjutan. Masyarakat siap dibina dan berlari bersama pemerintah pusat,” tukas Adi.

Terakhir, Adi Suryadi meyakini keberadaan IKN ke depan pasti lebih banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Sepaku. Keberadaan desa pintar di Bukit Raya merupakan fondasi bagi terwujudnya Kota Pintar IKN.



“Desa Bukit Raya saat ini menjadi satu-satunya desa di kawasan IKN yang menjadi desa digital.”

Adi Suryadi. Sekretaris Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku

Rumah Teknologi Nusantara

Gambaran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Kota Cerdas bisa dilihat di Rumah Teknologi Nusantara, Kecamatan Sepaku. Sarana ini resmi beroperasi pada 17 Agustus 2023. Awalnya lokasi Rumah Teknologi Nusantara atau Techno House adalah eks rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara yang kemudian dialihfungsi dan dikelola Otorita IKN.

Rumah Teknologi dibuat sebagai destinasi edukasi publik mengenai konsep dan perkembangan IKN sekaligus wadah dilakukan berbagai pameran dan *proof of concept* (implementasi konsep teknologi) yang dapat diaplikasikan sebagai wujud Kota Cerdas Nusantara.

Sekar Dwijayanti, staf Rumah Teknologi Nusantara memaparkan apa saja fasilitas di Rumah Teknologi Nusantara ini. Setelah memasuki pintu utama, publik akan menemui ruang teater sebagai wahana menjelaskan tentang filosofi dan makna Ibu Kota Nusantara. Ruang berikutnya terdapat video komunikasi yang menjelaskan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Video ini menjelaskan visi dan delapan prinsip pembangunan IKN. Selain mengenai KPI (*key performance indicator*) pembangunan IKN yaitu kota cerdas, menuju kota bersih 2024, netral karbon dan berkelanjutan, dan kota pemberdayaan masyarakat,” jelas Sekar.

Sebagai bagian dari desain IKN sebagai *Smart Forest City*, Rumah Teknologi memamerkan sejumlah aplikasi dan piranti teknologi canggih, baik kreasi anak negeri maupun dari vendor asing, seperti Telkom Indonesia yang memamerkan aplikasi *smart city* berupa *dashboard* pengendalian wilayah. Gerai Telkom juga menunjukkan purwarupa teknologi *smart home*. “Semua komponen di rumah terhubung dengan *smartphone*, mau *nyalain* AC, pintu melalui *smartphone* dan *voice*,” jelasnya.



“Rumah Teknologi adalah sarana edukasi publik mengenai konsep dan perkembangan IKN sekaligus wadah dilakukan berbagai pameran dan *proof of concept* wujud Kota cerdas Nusantara.”

Sekar Dwijayanti, Staf Rumah Teknologi Nusantara menjelaskan purwarupa robot kepada tamu IKN



Purwarupa Sky-Taxi buatan Hyundai Korea.



Display teknologi logistik di Rumah Teknologi Nusantara.

Produsen IT Jerman, Siemens, menampilkan sistem yang mampu mengontrol utilisasi wilayah kota yang sesuai dengan desain kota Nusantara, yaitu yang menggunakan *multiutility tunnel*, mulai dari kabel jaringan, listrik, drainase, air bersih semua melalui kanal bawah tanah.

Beragam penyedia solusi teknologi informasi dari Finlandia menampilkan aplikasi yang lebih beragam. Salah satunya, berupa *mock-up* infrastruktur *smart pole* yang mengintegrasikan beragam fungsi seperti sel surya, kamera deteksi, dan lampu. Setiap titik lampu di suatu kawasan atau bangunan dapat mendeteksi sekaligus tingkat suhu, kecepatan angin, dan prakiraan cuaca.

“Teknologi ini juga bisa mengetahui jumlah orang di dalam gedung, jumlah pejalan kaki, jumlah kendaraan

dalam satu jalan. Misalnya ada over populasi apa yang harus dilakukan pemerintah setempat,” tukas staf Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN.

Perusahaan asal Tiongkok Huawei juga memamerkan teknologi *smartphone* yang mempunyai fitur kontak darurat (*emergency call*) langsung ke Command Center. Melalui Command Center ketika ada kondisi darurat dapat segera memberikan informasi kepada kepolisian, rumah sakit, maupun pemadam kebakaran terdekat.

Gerei Sky-Taxi dari Hyundai cukup banyak diminati pengunjung. Menggunakan tenaga listrik (*electric vehicle/EV*), mampu terbang di ketinggian 1.000 kaki (350 meter), mampu melaju pada kecepatan 250 km/jam serta mampu beroperasi hingga 100 km. Taksi terbang ini berkapasitas lima orang penumpang, terdiri dari satu pilot dan empat penumpang.

Taksi terbang akan dipakai untuk mobilitas di sekitar Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda dengan radius sekitar 100 km dari IKN. Estimasi waktu dari Balikpapan ke Nusantara membutuhkan waktu 15 menit. “Menghubungkan ekosistem tiga kota. Balikpapan sebagai kota industri minyak dan Samarinda sebagai ibukota Kalimantan Timur dan akan diuji coba terbang sebelum Agustus 2024,” jelas Sekar.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN menampilkan tayangan terkait Pedoman Bangunan Cerdas Nusantara yang memuat peraturan membangun di IKN serta sistem keamanan gedung dan sesuai standar internasional. “Jadi masyarakat dan investor-investor dapat mengakses ini untuk mengetahui *Key Performance Indicator* membangun di IKN. Mulai dari *waste management*-nya seperti apa, sudah diatur dalam pedoman bangunan cerdas.”

Dari Rumah Teknologi ini, diketahui Otorita IKN juga sudah mempunyai web Monitoring Nusantara alias Montara dimana melalui web ini publik dapat mengikuti proses pembangunan IKN secara langsung (*live*) namun operasionalnya masih menunggu perizinan.

OIKN mengungkapkan jumlah pengunjung Techno House Nusantara sejak September - Desember 2023 mencapai 2.200 orang, baik pengunjung lokal dan internasional terdiri dari anak-anak sekolah, investor, mahasiswa luar negeri, dan pejabat pemerintahan.

Apa tanggapan pengunjung? “Respons mereka menjadi tahu gambaran ke depannya IKN seperti apa. Karena masyarakat tidak bisa masuk ke dalam proyek, dengan begitu mereka tahu kondisi di sana. Untuk investor dapat melihat peluang bisnis di dalamnya. Ini adalah tahap awal gambaran pembangunan IKN,” ujar Sekar.



Ruang pameran Rumah Teknologi Nusantara.



Purwarupa teknologi robot di Rumah Teknologi Nusantara.

ENERGI HIJAU DAN MASYARAKAT LOKAL

Komitmen Menyediakan Energi Bersih di IKN

Sebanyak 21.600 panel surya (*solar farm*) sudah terpasang di sebagian lahan seluas 100 hektare di wilayah IKN. Pemasangan panel surya itu sudah dimulai sejak April 2023. Sebagai bagian dari fase I pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MegaWatt (MW) untuk menerangi kawasan IKN.

Langkah ini menjadi salah satu komitmen dalam mewujudkan kawasan IKN yang hijau dan ramah lingkungan. Sebagai upaya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) atau *green energy*. Proyek ini dikerjakan oleh Nusantara Sembcorp Solar Energy atau

NSSE adalah perusahaan patungan antara Nusantara Renewable, anak perusahaan subholding PT PLN, Nusantara Power, dengan Sembawang Corp/Sembcorp (perusahaan energi Singapura).

Menurut Syarief Andrian, Direktur Operasi Nusantara Sembawang Solar Energy, saat ini sudah selesai dilaksanakan pembangunan PLTS 10 MW, dari total kapasitas 50 MW. Ditargetkan, *Commercial Operation Data* (COD) PLTS 10 MW dilakukan pada Februari atau Maret 2024. Adapun sisanya PLTS 40 MW baru akan COD di pertengahan 2024 dengan rencana proyek ini tuntas pada November 2024. "Dua puluhan ribu panel itu untuk

10 MW. Sisanya nanti dikerjakan oleh pihak Sembcorp pada 2024. Tahapan kedua memakai *battery energy storage system* (BESS)," jelas Syarief.

PLTS dengan kapasitas terpasang 50 MW itu akan memproduksi energi hijau sekitar 92,8 gigawatt per jam (GWh) per tahun, dan mampu mereduksi emisi sebesar 194,8 ribu ton karbon dioksida per tahun.

Produksi PLTS IKN akan memasok kebutuhan listrik di IKN sebesar 10 persen. Saat ini kebutuhan listrik di IKN masih sebesar 8 MW. Sementara ini proyek IKN masih dapat disuplai dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur.

Pemerintah menargetkan IKN dapat menggunakan EBT sebesar 80 persen dari total kebutuhan listriknya pada 2045. PLN juga merencanakan membangun

gardu induk berkapasitas 50 MW yang akan digunakan sebagai sumber pasokan listrik saat pembangunan PLTS berjalan di IKN.

Pihak NSSE juga meminta kepada pihak Otorita IKN agar segera membangun jalan akses menuju PLTS. Begitu pula untuk perizinan perluasan lahan PLTS, karena lahan proyek dikelilingi kawasan Hutan Tanaman Industri. Namun demikian, Syarief Andrian mengaku memberikan apresiasi atas dukungan Otorita IKN dalam pelaksanaan proyek ini.

"Kami sangat bangga terlibat di IKN dalam menyediakan energi bersih. Apalagi PLN siap mendukung energi listrik seiring dengan kebutuhan IKN di masa depan. Kebutuhan listrik makin besar karena akan banyak industri masuk ke Kalimantan Timur. Suplai dari IKN ini juga akan masuk ke interkoneksi Kalimantan."



Sebanyak 21.600 panel surya sudah terpasang di PLTS IKN.



"Kami sangat bangga terlibat di IKN dalam menyediakan energi bersih. Suplai dari IKN ini juga akan masuk ke interkoneksi Kalimantan."

Syarief Andrian, Direktur Operasi Nusantara Sembcorp Solar Energy (NSSE)

Agar Tidak Menjadi Penonton Kemajuan IKN

Dampak positif dirasakan Karyadi, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) sejak pembangunan berlangsung di IKN dalam dua tahun terakhir, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan IKN.

Ada tiga poin utama tuntutan masyarakat adat terkait pembangunan IKN, yakni perbaikan infrastruktur, ketersediaan air bersih, dan aliran listrik. Bagi Karyadi, saat tiga hal ini sudah mampu dipenuhi dengan keberadaan IKN, dapat dikatakan masyarakat sudah cukup sejahtera.

“Sarana infrastruktur seperti jalan amat dibutuhkan bagi masyarakat. Karena menyangkut biaya transportasi dan logistik. Harga-harga pangan pokok bisa mahal kalau ongkos angkutannya tinggi. Ikan yang diambil dari Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau bisa membusuk kalau jalannya masih rusak,” ujar warga Desa Maridan, Kecamatan Sepaku itu.

Kebutuhan air bersih amat penting bagi masyarakat sekitar IKN mengingat sudah bertahun-tahun, masyarakat Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, masih kesulitan mendapatkan suplai air bersih. Untuk air minum, masyarakat terpaksa membeli air galon. “Semoga dengan adanya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, air bersih dapat disalurkan ke masyarakat sekitar IKN,” jelasnya.

Aliran listrik bagi masyarakat Kalimantan Timur sudah sangat memadai mengingat warga Sepaku yang berdekatan dengan IKN sudah merasakan stabilnya pasokan listrik.

Karyadi menyampaikan masyarakat saat ini sudah merasakan perbaikan infrastruktur jalan sejak mulai dikembangkan kawasan IKN. “Untuk kualitas infrastruktur jalan seluruh IKN sudah 99 persen bagus yang saya rasakan,” menurut pria asal Barito tersebut.

Mulusnya jalan di kawasan penyangga IKN, Penajam Paser Utara maupun wilayah Kutai Kartanegara hingga Balikpapan menunjukkan pertumbuhan ekonomi membaik. “Dulu sebelum 2019, jarak tempuh dari Balikpapan ke Sepaku memakan waktu 4 jam, sekarang cukup 1,5-2 jam,” ungkap Karyadi.

Lebih lanjut, Karyadi juga berharap adanya pelatihan yang lebih banyak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk warga sekitar IKN. Sebetulnya, banyak anak-anak muda lulusan SI di Sepaku, namun sebagian lebih banyak berkiprah di swasta, “Padahal mereka cukup berkualitas agar kita tidak menjadi penonton saja dengan kemajuan IKN,” jelasnya.

Melibatkan lebih banyak putra-putri Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan IKN, menurut tokoh adat Sepaku itu, diharapkan dapat menekan potensi ketimpangan sosial di wilayah tersebut. Pihak Otorita IKN juga sudah sering bersosialisasi dan berembuk dengan masyarakat adat terkait peran masyarakat dalam pembangunan IKN, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, dan potensi pariwisata.

Oleh karena itu, Karyadi bersyukur beberapa warga di desanya dilibatkan dalam pelatihan keterampilan yang difasilitasi Otorita IKN, seperti membuat roti dan barista kopi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PDKT Suripuddin mengingatkan agar para siswa ditingkatkan

pengetahuannya soal teknologi informasi. Ini merupakan upaya percepatan agar siap menjadi warga IKN yang didesain sebagai *Forest Smart City*.

“Sejumlah pelatihan vokasi dan penambahan jurusan SMK juga diperlukan seperti pelatihan TOEFL untuk guru dan siswa tingkat akhir dan jurusan konversi motor konvensional menjadi motor listrik,” jelas Suripuddin yang juga guru SMK 6 Penajam Paser Utara itu.

Meski demikian, Karyadi dan Suripuddin menegaskan seluruh komponen masyarakat adat di Kalimantan Timur baik dari Dayak Paser, Paser Balik, Banjar maupun Jawa mendukung penuh keberadaan IKN. “Kami menginginkan anak cucu kami menikmati dan bekerja di IKN.”



“Dulu sebelum 2019, jarak tempuh dari Balikpapan ke Sepaku memakan waktu 4 jam, sekarang cukup 1,5-2 jam.”

Karyadi, Tokoh Masyarakat Dayak Kalimantan Timur/Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT)

Suripuddin, Wakil Ketua Ketua PDKT/ Kepala Sekolah SMK 6 Penajam Paser Utara



INVESTASI UNTUK MASA DEPAN

Lokasi : Hotel Nusantara
Foto : Humas OIKN

Potensi investasi di Ibu Kota Nusantara sangat besar, dengan peluang di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi, dan pariwisata.

Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar transformasi menuju “Kota Dunia untuk Semua” tapi juga menciptakan peluang investasi besar bagi investor baik nasional maupun internasional untuk turut berkontribusi dalam menciptakan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Berbagai peluang investasi dan pembiayaan disediakan pemerintah guna mewujudkan IKN sebagai sarana meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kepulauan Indonesia, terlebih lagi skema pembiayaan IKN sebesar 80 persen berasal dari non-APBN.

Respons positif dari investor lokal maupun internasional terhadap pembangunan IKN berbuah manis. Hingga akhir 2023, setidaknya 35 investor pelopor nasional menanamkan modal hingga Rp47,5 triliun melalui investasi di sektor properti, kawasan komersial, rumah sakit, dan transportasi.

Insentif untuk Berinvestasi di IKN

Peluang mengembangkan IKN secara bersama-wkorporasi yang berminat berinvestasi di IKN diatur dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Untuk itu pemerintah menerbitkan berbagai insentif, termasuk regulasi, guna mendukung percepatan investasi di IKN antara lain

kepemilikan tanah tanpa biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta hak kepemilikan/penggunaan yang kompetitif seperti Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 80 tahun, dan Hak Penguasaan Lahan (HPL) 80 tahun.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pemerintah melalui kementerian terkait juga memberikan pembebasan biaya kompensasi kepada investor terkait pekerja asing, sekaligus memberikan dukungan penyediaan hunian utama bagi investor beserta karyawannya. Terdapat pula insentif fiskal berupa *tax holiday*, *super-deduction*, pembebasan bea cukai 4-6 tahun, Pajak Penghasilan badan (PPh) 0 persen selama 10 tahun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor 0 persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen, Bea Masuk 0 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0 persen selama 10 tahun.

Otorita IKN juga telah menyiapkan 12 paket investasi prioritas untuk pengembangan kawasan IKN, yang meliputi energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, hunian, pengolahan air, pengolahan sampah, infrastruktur digital,



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otorita IKN dan Sergek Group Kazakhstan, 2 September 2023.



Presiden RI dan Kanselir Jerman mengunjungi stand IKN di Hannover Messe 2023, 17 April 2023.

infrastruktur komersial, layanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum, layanan pendidikan, dan kawasan industri.

Potensi Besar Investasi IKN

Kebijakan ini dirancang agar Ibu Kota Nusantara bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris. OIKN berharap dunia usaha membantu menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi Indonesia.

Pembangunan IKN membutuhkan investasi dan kolaborasi yang besar antara pemerintah dan pelaku bisnis karena Nusantara dibangun dari awal di atas lahan hijau, yang memberikan kesempatan unik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien.

Potensi investasi di IKN sangat besar, dengan peluang di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi, dan pariwisata. Kota Nusantara juga targetkan menjadi pusat inovasi, dimana pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan serta menarik perusahaan teknologi.

Sampai akhir tahun 2023, OIKN sedikitnya telah menerima 350 *Letter of Intent* (LoI) atau pernyataan minat dari investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN yang didominasi dari negara ASEAN. Diharapkan pada tahun 2024 para investor tersebut merealisasikan minat mereka khususnya untuk pengembangan kota cerdas dan energi hijau.

“Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80 persen dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai.”

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono

Tiga Groundbreaking di 2023

Empat bulan terakhir tahun 2023 menjadi masa tersibuk bagi OIKN karena secara berturut-turut menggelar tiga peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pelbagai pembangunan proyek di IKN dengan investasi dari 23 perusahaan/lembaga senilai Rp41 triliun.

Peningkatan yang signifikan realisasi investasi ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, tidak hanya sebagai ibu kota baru melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan.

Groundbreaking tahap 1 diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 21 September 2023. Diawali dengan peresmian pembangunan Hotel Nusantara sebagai salah satu investasi konsorsium 10 perusahaan nasional yang dipimpin Agung Sedayu Group (ASG). Total komitmen nilai investasi konsorsium ASG untuk beberapa lokasi di IKN sebesar Rp20 triliun.

Rumah sakit Abdi Waluyo dengan total 400 kamar menjadi proyek swasta kedua dan rumah sakit pertama yang dibangun di IKN meletakkan batu pertama pada 22 September 2023 dengan nilai investasi Rp2 triliun. Terakhir, Presiden meresmikan peletakan batu pertama Hotel Vasanta Group di IKN pada 23 September 2023.

Sebulan kemudian kembali dilakukan *Groundbreaking* tahap 2 dimana tiga investor nasional sekaligus menanamkan modalnya di Nusantara, yakni Mayapada Group, PT Medialoka Hermina Tbk, dan PT Pakuwon Jati Tbk dengan nilai investasi mencapai Rp12,5 triliun yang diresmikan Presiden RI pada 1 November 2023.

Mayapada Group akan membangun Mayapada Hospital Nusantara dengan investasi Rp500 miliar, sedangkan, pembangunan rumah sakit ke-3 di IKN oleh RS Hermina nilainya mencapai Rp650 miliar. Kedua rumah sakit baru itu akan dibangun dengan mengusung konsep *green hospital* yang akan mendorong percepatan pembangunan IKN dan ditargetkan mulai beroperasi pada semester II 2024.

PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak usaha PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) secara resmi menyampaikan komitmen membangun IKN melalui proyek superblok senilai Rp5 triliun di atas lahan 7,2 hektar berlokasi strategis di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu Titik Nol. Menggandeng grup Marriott International, Pakuwon Nusantara akan terdiri dari Hotel Four Points by Sheraton, hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin serta dilengkapi mal perbelanjaan.



Presiden Joko Widodo meresmikan *groundbreaking* pembangunan Hotel Nusantara di IKN.

Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 020 Sepaku yang akan dibangun Yayasan Pendidikan Astra, kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, kantor Bank Indonesia, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW) juga diresmikan pembangunannya pada *Groundbreaking* tahap 2.

Pada 20-21 Desember 2023 digelar *Groundbreaking* tahap 3 dari beberapa investor nasional antara lain apartemen The Pakuwono Nusantara terdiri dua menara apartemen dengan investasi Rp1 triliun yang akan menghadirkan hunian apartemen berstandar internasional di IKN, serta pembangunan BSH Hub Community dari investor lokal PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang sukses membangun kawasan komersil Balikpapan Superblock (BSB).

Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil-menengah seperti BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional “Kampung Kecil” juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebagai *Smart Sustainable Forest City*, sektor energi hijau dan transportasi hijau juga menjadi sektor penting yang telah melakukan *groundbreaking* di Ibu Kota Nusantara seperti PT PLN Nusantara Power bersama perusahaan energi dari Singapura, Sembcorp telah membangun PLTS untuk kebutuhan listrik di IKN. Selain itu, PT Bluebird juga mengembangkan sistem transportasi hijau berupa layanan Bus Rapid Transit dan taksi listrik bagi warga Ibu Kota Nusantara.



Presiden meninjau pembangunan Hotel Nusantara



Presiden melakukan penanaman pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN



Presiden melakukan siaran langsung di studio RRI Nusantara



Sebanyak 130 investor asal Singapura mengunjungi kawasan IKN, 30 Mei-1 Juni 2023.

Minat Investor Internasional

Puluhan investor internasional juga banyak berminat investasi dalam pembangunan IKN, namun Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan investor asing memang tidak bisa serta merta masuk terlibat dalam pembangunan di IKN, mereka harus melalui berbagai tahapan seleksi dan sesuai kebutuhan di IKN. Investor internasional berinvestasi menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Sejumlah investor asing sudah memasuki tahap studi kelayakan atau *Feasibility Study (FS)* di antaranya investor yang berminat membangun hunian untuk tempat tinggal aparatur sipil negara atau ASN maupun aparat keamanan dan pertahanan.

Yang paling maju karena sudah masuk proses evaluasi FS ialah investor dari Tiongkok, CITIC Construction yang ingin membangun 60

menara hunian Kemenhan. Selanjutnya ada dua investor dari Malaysia, yakni Maxim dan IJM, masing-masing berencana membangun 10 menara ASN dan 20 menara ASN dengan target tahap penyelesaian FS selesai pada akhir 2023.

Selain mereka ada investor nasional yang membangun hunian baik bagi ASN maupun umum, seperti Summarecon 6 menara ASN, Trinitiland 8 menara ASN, PT Nindya Karya 8 menara ASN, Intiland 109 *townhouses*, Ciputra 10 menara dan 20 *townhouses*.

Kesemuanya masuk ke dalam bagian inisiator pembangunan hunian 166 menara dan 159 rumah tapak di IKN dengan indikasi nilai belanja modal atau *capital expenditure* Rp55 triliun untuk pembangunan tahun 2025.

Selain untuk proyek hunian, investor internasional juga akan masuk ke enam kategori proyek inisiatif IKN sebagai kota cerdas, antara lain investor dari Korea Selatan, Amerika Serikat,

Prancis, Tiongkok, Jerman, serta Finlandia. Mereka akan diseleksi untuk transfer teknologi membangun sistem perkotaan cerdas, seperti *smart management* untuk gedung dan berbagai fasilitas, air, sampah, dan energi, serta layanan pemerintah seperti *e-citizen platform centralized public database*, hingga data *driven urban planning*.

Dengan realisasi peminatan investasi ini, OIKN semakin optimistis menyambut 2024 karena akan semakin banyak investor yang berinvestasi sehingga dalam jangka panjang dapat mencapai target 80 persen dana pembangunan IKN dari non-APBN.

Untuk itu, OIKN terus berupaya dengan untuk meningkatkan realisasi investasi di Nusantara, terutama dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di Nusantara baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Puluhan investor internasional juga banyak berminat investasi dalam pembangunan IKN.



KEMITRAAN GLOBAL MENUJU KOTA DUNIA

Lokasi : Istana Presiden
Foto : Humas OIKN

“IKN tidak hanya menawarkan sesuatu yang baru untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia.”

Tony Blair, Executive Chairman of Tony Blair Institute for Global Change

Selain menjadi langkah transformasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Ibu Kota Nusantara (IKN) juga merupakan kontribusi aktif Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan yang saat ini dihadapi dunia. Penerapan berbagai inovasi yang menjadikan IKN sebagai kota cerdas, hijau, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan berpotensi untuk menjadi contoh dan acuan bagi pengembangan kawasan urban tidak hanya bagi kota-kota di Indonesia, namun juga di dunia.

Dalam hal ini, proses pembangunan IKN memberikan dampak setidaknya pada tiga gerakan global. Pertama, IKN ingin berperan aktif dalam menangani krisis perubahan iklim dunia. Hal tersebut terutama didukung oleh keberadaan setidaknya 65 persen kawasan daratan IKN yang akan dikonversi dari hutan produksi menjadi hutan tropis, melalui proses reforestasi.

Sejalan dengan semangat tersebut, Otorita IKN meluncurkan Nusantara *Net-Zero Strategy*. Peta jalan untuk dapat mencapai target emisi nol bersih pada 2045 ini diterbitkan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-28 (COP-28) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Dubai, Uni Emirat Arab pada bulan Desember 2023. IKN menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki strategi komprehensif untuk mencapai *net-zero*.

Kedua, IKN ikut serta dalam agenda global untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yang dilakukan antara lain dengan menjaga habitat flora dan fauna di Kalimantan. Otorita IKN tengah menyusun strategi biodiversitas Nusantara *Nature Positive Plan*, yang sejalan selaras dengan prinsip-prinsip *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*.



Kunjungan Tony Blair Institute for Global Change di kantor OIKN Jakarta.

Ketiga, IKN memastikan agar pembangunan IKN sejak awal telah bermuara pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Salah satu komponen penting untuk tercapainya tujuan ini adalah Tinjauan Sukarela SDGs di Tingkat Lokal (*Voluntary Local Review*).

Otorita IKN meluncurkan kajian dasar untuk VLR SDGs di IKN tersebut pada Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB di Asia dan Pasifik (UNESCAP) pada bulan Februari 2024 di Bangkok, Thailand. Sedangkan kajian akhir VLR SDGs IKN akan disampaikan dalam forum PBB High-level Political Forum on Sustainable Development pada Juli 2024 di New York, Amerika Serikat. Dengan langkah-

langkah strategis ini, IKN diakui oleh UNESCAP sebagai ibu kota baru pertama di dunia yang menyampaikan VLR-nya.

Kota Kelas Dunia untuk Semua

Dengan besarnya peran IKN dalam berbagai gerakan global, kota baru ini telah mampu menarik berbagai institusi internasional untuk ikut mewujudkan kota hutan cerdas dan berkelanjutan yang pertama di dunia ini. Ketertarikan tersebut didasari oleh fakta bahwa IKN merupakan "*living laboratory*" yang memberi kesempatan unik bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengimplementasikan pengetahuan (*knowledge*) termutakhir yang dapat menjadi solusi bagi pembangunan berkelanjutan.



Pertukaran Nota Kesepahaman antara Otorita IKN dan Kementerian Pembangunan Nasional Singapura pada 16 Maret 2023, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Dukungan ini antara lain datang dari PBB. Pada November 2023, 13 lembaga di bawah PBB mendeklarasikan dukungannya untuk mewujudkan IKN yang selaras dengan prinsip-prinsip SDGs. Deklarasi dilakukan di sela-sela *Spatial Planning Platform Conference*, konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh Otorita IKN bersama UN-Habitat. Dukungan tersebut antara lain datang dari UNDP, UN-Habitat, UNFPA dan UNICEF, serta dikoordinasikan oleh Koordinator Tetap PBB di Indonesia.

Selain itu, Asian Development Bank (ADB) dan USAID juga memberikan dukungannya. Hingga Januari 2024, ADB telah membantu IKN dalam 13 aspek kegiatan terkait pada pencapaian target emisi nol bersih. Sedangkan USAID memberikan dukungannya dalam perancangan peta jalan IKN sebagai kota cerdas.

Mantan Perdana Menteri Inggris Sir Tony Blair memberi dukungannya pada pembangunan IKN sejak awal. Organisasi nirlaba Tony Blair Institute for Global Change (TBI) mendampingi Otorita IKN untuk mendorong investasi swasta di IKN antara lain dalam sektor pendidikan, termasuk melalui penguatan komunikasi di pasar internasional.

Dukungan juga datang dari institusi pengetahuan internasional. Lembaga seperti ADB Institute, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan Islamic Development Bank Institute (IsDBI) tengah melakukan riset bersama mengenai berbagai aspek sosial dan ekonomi di kawasan IKN.

Sementara itu, Stanford-Doerr School of Sustainability (Amerika Serikat) bekerja sama dengan Otorita IKN untuk mengembangkan



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otorita IKN dan Asian Development Bank (ADB) pada 5 Mei 2023, di sela-sela Rapat Tahunan ADB di Incheon, Republik Korea.



Kepala Otorita IKN mendampingi kunjungan delegasi Badan PBB di Kantor OIKN Jakarta.

riset bersama bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kampus di IKN bagi kegiatan riset tersebut akan dilakukan oleh para alumni Stanford University asal Indonesia. Kerja sama pendidikan juga dijajaki antara Otorita IKN termasuk dengan Turku University Finlandia, serta konsorsium tiga universitas Belanda (Leiden University, Delft University of Technology, dan Erasmus University Rotterdam).

Otorita IKN juga menjalin kemitraan dengan berbagai kota dan negara. IKN memiliki kerja sama resmi dengan Astana (Kazakhstan), Canberra (Australia), dan Shenzhen (Tiongkok). Di tingkat nasional, Otorita IKN juga bermitra dengan Pemerintah Finlandia dan Singapura. Otorita IKN terus menjalin komunikasi dengan

kota-kota lain di dunia untuk belajar dari keberhasilan sekaligus kegagalan masing-masing kota dalam mengelola pembangunan berkelanjutan.

Tingginya minat kerja sama berbagai institusi global dengan IKN dijelaskan oleh Sir Tony Blair. Menurutnya, IKN bukanlah sekadar urusan memindahkan lokasi ibu kota, melainkan menjadi simbol dunia yang terus berubah pesat dengan mengedepankan harmoni dengan lingkungan, serta inovasi bagi 'sektor masa depan' seperti transisi energi dan teknologi digital. "IKN ini tidak hanya menawarkan sesuatu yang baru untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia," ungkapnya.



INFORMASI PENDUKUNG

Lokasi : Sumbu Kebangsaan Barat
Foto : Humas OIKN

CAKUPAN WILAYAH IKN

Luas Total IKN

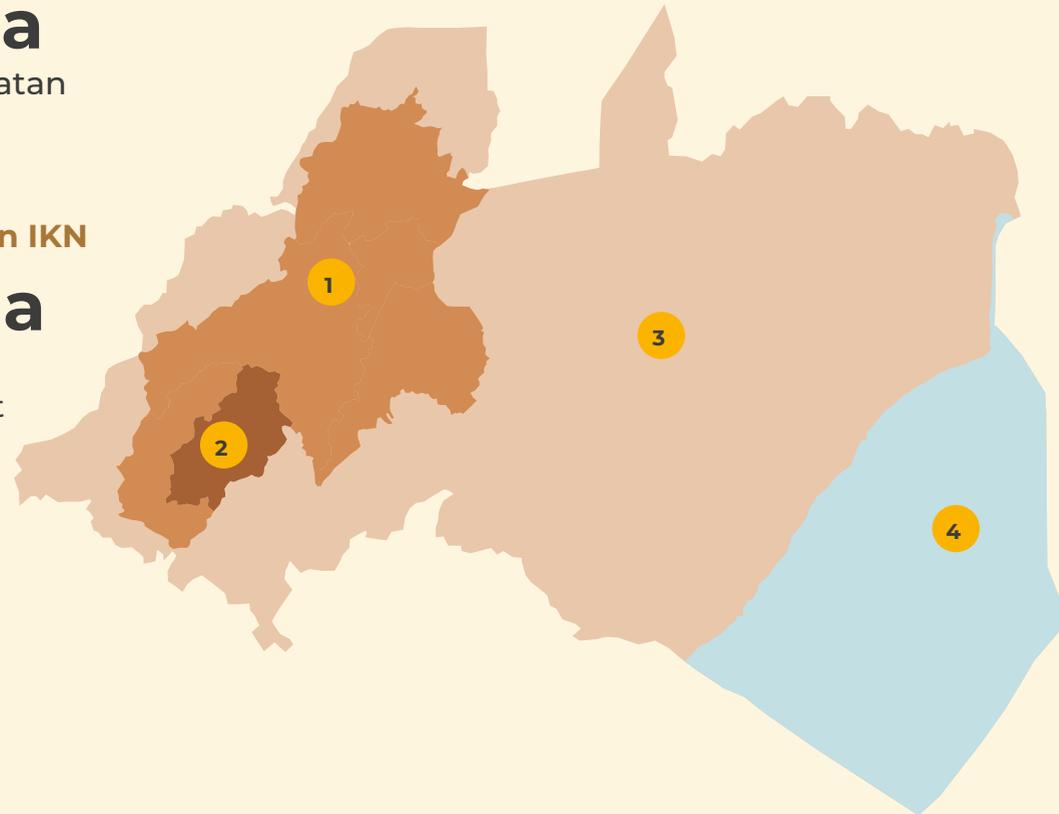
322.429 Ha

Meliputi Wilayah Daratan dan Perairan Laut

Luas Wilayah Daratan IKN

252.660 Ha

Terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan



1

Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)

49.490 Ha

Wilayah KIKN meliputi 6 Wilayah Perencanaan (WP). Terdiri atas 12 wilayah administratif setingkat desa/kelurahan

2

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

6.671 Ha

Terdiri atas 2 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan

3

Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)

196.501 Ha

4

Kawasan Perairan Laut

69.769 Ha

Terdiri atas kawasan pemanfaatan umum dan alur laut

Sumber: UU No 21 Tahun 2023 ttg Perubahan UU No 3 Tahun 2022 ttg IKN dan Satgas Pembangunan IKN-PUPR.

PEMBAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (WP)

WP KIPP

- Pusat Pemerintahan Nasional (Istana Negara, Perkantoran K/L, Diplomatik)
- Pertahanan & Keamanan
- Perumahan dan Permukiman

WP IKN BARAT

- Pusat Ekonomi, Bisnis dan Keuangan
- Pariwisata Alam
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN SELATAN

- Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Permukiman Perdesaan
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 1

- Pusat Hiburan (*International Amusement Park*), *Sport Center*
- Pariwisata
- Perdagangan & Jasa
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 2

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Pusat Riset & Inovasi
- Perdagangan & Jasa
- Perkantoran
- Pelayanan Kesehatan

WP IKN UTARA

- Pusat Riset & Inovasi
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pusat Perkantoran
- Pariwisata

WP SIMPANG SAMBOJA

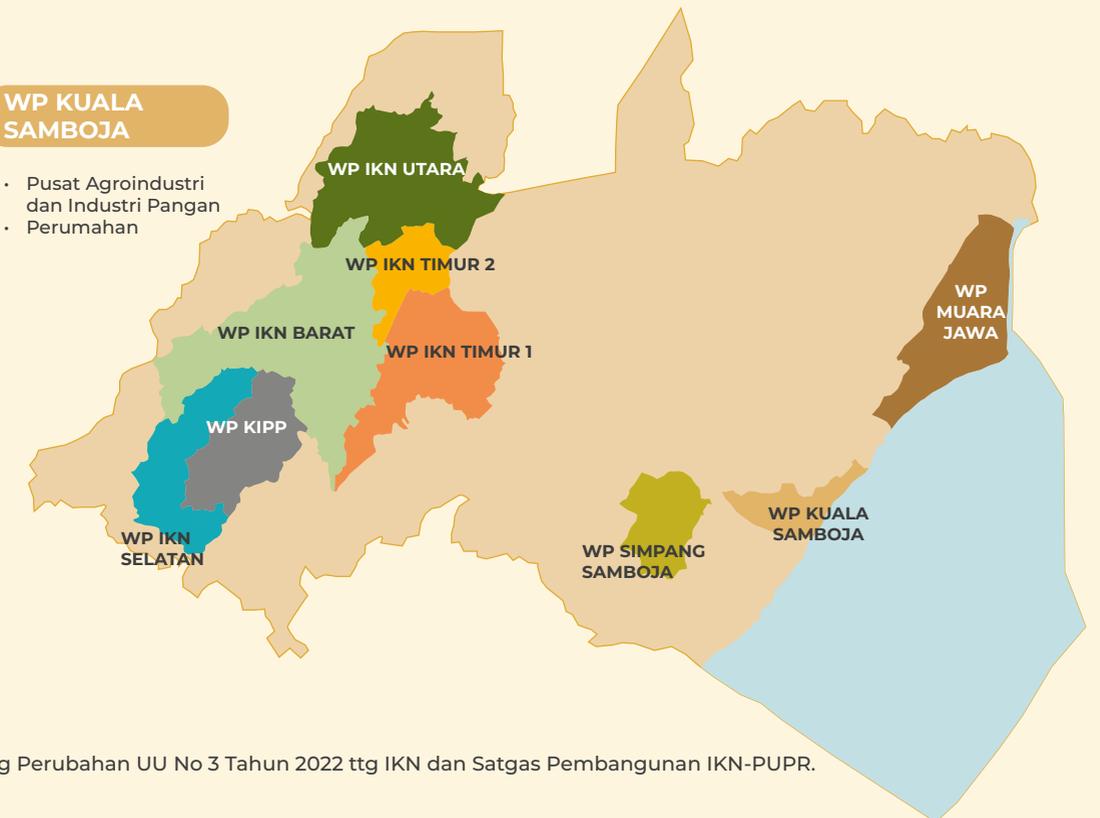
- Pusat Distribusi & Perdagangan Komoditas Kawasan
- Perumahan dan Permukiman

WP KUALA SAMBOJA

- Pusat Agroindustri dan Industri Pangan
- Perumahan

WP MUARA JAWA

- Pusat Pelayanan Publik
- Pusat Kegiatan Berbasis Pertanian & Perikanan
- Perumahan dan Permukiman



Sumber: UU No 21 Tahun 2023 ttg Perubahan UU No 3 Tahun 2022 ttg IKN dan Satgas Pembangunan IKN-PUPR.

DELAPAN PRINSIP UTAMA PEMBANGUNAN IKN

01 Mendesain Sesuai Kondisi Alam
Mendesain Ibu Kota Negara dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat menjadi prinsip penting. Melalui pemahaman mendalam terhadap ekosistem, topografi, dan karakteristik geografis kawasan, pembangunan Ibu Kota dapat terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitar, serta memastikan keberlanjutan ekosistem yang ada.

02 Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman budaya, sosial, dan etnis dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Dengan menghargai dan memahami keberagaman ini, Ibu Kota dapat menjadi cerminan yang nyata dari semangat persatuan dalam perbedaan, seperti yang tercermin dalam motto nasional "Bhinneka Tunggal Ika."

03 Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses
Konektivitas dan aksesibilitas yang baik menjadi fokus prinsip ini. Pengembangan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antarwilayah dan memastikan akses yang mudah bagi warga menjadi kunci. Fasilitas transportasi yang efisien akan mendukung aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi.

04 Aman dan Terjangkau
Lingkungan yang aman dan terjangkau menjadi aspek utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Langkah-langkah keamanan harus terintegrasi dalam desain, sementara kebijakan terkait perumahan dan biaya hidup harus memastikan bahwa Ibu Kota dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup.

05 Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi
Penerapan teknologi modern menjadi kunci dalam mencapai kenyamanan dan efisiensi di Ibu Kota Negara. Penggunaan inovasi teknologi dalam manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi akan memastikan operasional yang efisien dan memberikan kenyamanan kepada warga.

06 Peluang Ekonomi untuk Semua
Menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi prinsip fundamental. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja akan menjadikan Ibu Kota Negara sebagai pendorong ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

07 Rendah Emisi Karbon
Seratus persen kebutuhan energi IKN akan dipenuhi oleh instalasi kapasitas energi terbarukan. Peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum sebesar enam puluh persen di 2045 dengan target *Net Zero Emission* di IKN pada Tahun 2045.

08 Sirkuler dan Tangguh
Kebutuhan produksi pangan akan dipenuhi dari sepuluh persen lahan seluas kawasan pemerintahan IKN. Selanjutnya, enam puluh persen timbunan sampah didaur ulang pada tahun 2045 dengan seratus persen air limbah akan dikelola melalui sistem pengolahan pada 2035.

KEPALA, WAKIL KEPALA, DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA OTORITA IKN



TENTANG LOGO IKN : POHON HAYAT

Logo Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai sebuah identitas visual, merefleksikan filosofi pembangunan IKN, sekaligus merepresentasikan identitas IKN sebagai kota hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Perancangan identitas visual IKN mengedepankan asas transparansi, dengan menggelar sayembara terbuka untuk mengajak partisipasi seluas-luasnya dari para desainer grafis profesional nasional. Dimulai pada September 2022, tercatat lebih dari 500 nama desainer yang mengikutsertakan karyanya. Karya-karya yang masuk kemudian melalui proses kuratorial dan seleksi yang ketat sehingga mengerucut menjadi 10 desain, dan diseleksi lebih lanjut menjadi hanya lima rancangan. Di tahap terakhir yang berlangsung dari tanggal 4 April hingga 20 Mei 2023, masyarakat umum, melalui pemungutan suara daring, dipersilakan memilih satu dari kelima rancangan tersebut. Dari 500.260 suara yang masuk, porsi terbesar (26,6 persen) memilih logo ciptaan desainer Aulia Akbar yang bertema Pohon Hayat Nusantara.

Pada tanggal 30 Mei 2023 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemenang sayembara desain logo sekaligus menetapkan Pohon Hayat Nusantara sebagai logo dan identitas visual resmi IKN.

“Pohon hayat ini pohon kehidupan, dan kita berharap logo pohon hayat menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru, menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Presiden RI Joko Widodo

17 Kembang Mekar:
Representasi simbol momentum kemerdekaan Indonesia

Hexagon Talawang:
Landasan bentuk logo yang diambil dari siluet *hexagonal* perisai Talawang dari Kalimantan sebagai simbol pertahanan

5 Akar Pancasila:
Ideologi bangsa Indonesia sebagai landasan pemikiran nasional yang menjadi dasar negara dan penghidupan

7 Kepulauan Indonesia:
Representasi banyaknya jumlah pulau yang terdiri dari tujuh kepulauan terbesar sekaligus tujuh benua yang ada di dunia

Masyarakat Maritim:
Penggambarkan alur sungai sebagaimana Wawasan Nusantara melihat laut sebagai penghubung bangsa

Pohon Hayat:
Representasi kosmologis yang universal dalam seluruh budaya Indonesia

NUSANTARA

Logotype:
Sutasoma

[NUSANTARA]

Bentuk *logotype* Sutasoma adalah karakter khusus yang dirancang untuk identitas visual Ibu Kota Nusantara. Mpu Tantular, penulis kisah Pangeran Sutasoma, menunjukkan bahwa lewat bahasa sebuah peradaban dapat dibangun. Penamaan Sutasoma untuk *logotype* Ibu Kota Nusantara adalah sebuah penghargaan atas karya Mpu Tantular yang menjadi sumber inspirasi ideologi bangsa Indonesia, “*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*”, yang berarti “Berbeda-beda namun tetap satu, tidak ada kerancuan dalam kebenaran”.

PRODUK DIGITAL & STRUKTUR ORGANISASI OTORITA IKN

A. IKN Website:



B. Data Sharing Platform



C. Monitoring Nusantara (Montara)
– Platform Pengawasan Capaian
Pembangunan IKN:



D. IKNOW SuperApps



E. Struktur Organisasi:



F. Daftar Nama Pejabat/Pegawai
Di Lingkungan OIKN:



